

**PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP KORUPSI DAN TRANSPARANSI DI  
INDONESIA**

**(Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SHEFIRNA DHIYA SALSABILA**

**NIM. 210801082**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2026 M/1447 H**

## KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shefirma Dhiya Salsabila  
Nim : 210801082  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 28 September 2003  
Alamat : Keramat Mufakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya yang telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang Menyatakan,

  
Shefirma Dhiya Salsabila



## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP KORUPSI DAN TRANSPARANSI DI  
INDONESIA (Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

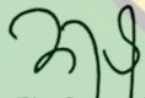
Oleh :

Shefirna Dhiya Salsablla  
NIM.210801082


Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

  
Eka Januar, M.Soc. Sc  
Nip. 198401012015031003

Pembimbing II

  
Danl Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. Ph.D.  
Nip. 198904082023211022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

# LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

PESEPSI GENERASI Z TERHADAP KORUPSI DAN TRANSPARANSI DI INDONESIA  
(Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

SHEFIRNA DHIYA SALSABILA

NIM.210801082

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Politik

Pada hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2026  
Senin, 7 Syaban 1447 H

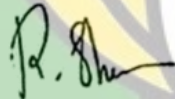
Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP.198401012015031003

Penguji I,



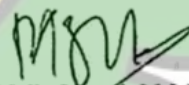
Rizkika Lhena Darwin, M.A  
NIP.198812072018032001

Sekretaris,



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. Ph.D  
NIP. 198904082023211022

Penguji II



Melly Masni, M.L.R  
NIP.199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muli Mullis, S.Apa, M.A., Ph.D  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik korupsi di Indonesia serta pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Generasi Z, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap korupsi dan transparansi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap isu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa FISIP mengenai korupsi dan transparansi yang diperoleh melalui mata kuliah yang telah mereka pelajari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar korupsi dan transparansi, namun pemahaman tersebut masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya diiringi dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan antikorupsi. Faktor lingkungan akademik, media sosial, dan pengalaman pembelajaran menjadi faktor utama yang memengaruhi perspektif mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kampus sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kegiatan akademik yang berkelanjutan.

**Kata kunci :** *Persepsi, Korupsi, Transparansi, Mahasiswa.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dukungan moral dan doa dari keluarga serta teman-teman seperjuangan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang mandalam, kepada :

1. Prof. Dr. Mujibburahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ramzi Murziqin, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Arif Akbar, M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik, dan Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. sebagai Penasehat Akademi (PA).
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eka Januar, M.Soc. Sc. Sebagai pembimbing utama dan Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc. Ph.D. sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Kepada Ayahanda dan ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang yaitu Muharri dan Sulastri yang telah bersusah payah melahirkan, menjaga, merawat, mendidik, mendo'akan dan membesarkan peneliti. Terima kasih tiada tara karna telah menemani dan memberi dukungan penuh kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.
7. Yang terkasih saudara kandung peneliti, abang beserta kakak dan adik peneliti Suari Eko Trisna, Sri Aulia Bestary, Fairel Atharizz Calief, dan Muhammad Zaqasyi. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, semangat, kepercayaan, dan pengorbanan yang tulus dan tiada henti-hentinya untuk penulis.
8. Kepada seorang sahabat peneliti Nurul Khairani yang sudah kebersamai peneliti dari SD sampai sekarang, sudah 18 tahun kita menajalani cerita bersama, semoga sampai akhir hayat tetap mengemban cerita.
9. Terima kasih kepada Marlinda, Melva Santia, Cut Ismi teman sanggar peneliti yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah, pendengar yang baik suka duka tawa hingga air mata yang kita lalui bersama sama dalam menempuh pendidikan, semoga tetap menjalin tali ini sampai selamanya.
10. Untuk pemilik Nim 210801079 Azra Irdina peneliti mengucapkan banyak terima kasih karna sudah mau menjadi sahabat peneliti di perantauan ini, yang sudah kebersamai peneliti dari semester satu sampai sekarang, memberikan dukungan serta selalu mengingatkan peneliti agar menyelesaikan skripsi ini. peneliti ucapkan terima kasih.

11. Terima kasih banyak kepada Riska Maulina teman prodi peneliti, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses membuat skripsi ini, terima kasih banyak sudah mau di teror peneliti dengan berbagai pertanyaan yang membuat peneliti bingung, namun adanya Riska membuat peneliti kembali kejalan nya. Terima kasih telah mendukung dan selalu memberi semangat kepada peneliti.
12. Untuk teman teman seperjuangan peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu namanya, yang telah membantu memberikan masukan kritik dan saran kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
13. Terakhir terima kasih banyak buat diriku sendiri yang telah bertahan sampai akhir pengerjaan skripsi ini, terima kasih banyak mau berjuang sampai satu langkah awal dibuka, gapapa kok proses mu lebih lambat dari teman lainnya, sejauh ini sudah sangat bagus untuk bisa sampai ketahap ini, semoga nanti bisa dan tetap berjuang serta bertahan di langkah berikutnya.

A R - R A N Banda Aceh, 10 Januari 2026

Peneliti,

Shefima Dhiya Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Persepsi.....	15
2.2.2 Teori Korupsi.....	20
2.2.3 Teori Good Governance (prinsip transparansi).....	34
2.2.4 Konsep Pemahaman (Taksonomi Bloom) .....	37
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	45

3.2	Jenis Penelitian.....	45
3.3	Metode pengumpulan Data .....	46
3.3.1	Wawancara.....	46
3.3.2	Dokumentasi .....	47
3.4	Saturasi Data .....	48
3.5	Informan Penelitian.....	49
3.6	Sumber Data.....	49
3.7	Teknik Analisis Tematik.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.1.1	Visi dan Misi.....	54
4.2	Proses Pembentukan Persepsi Mahasiswa FISIP Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia.....	56
4.3.1	Penyerapan (penerimaan).....	58
4.3.2	Pemahaman.....	61
4.3.3	Evaluasi.....	65
4.3	Pemahaman Mahasiswa FISIP Tentang Korupsi dan Transparansi di Indonesia .....	71
4.3.1	Konsep Toksonomi Bloom (ranah kognitif) .....	72
4.3.2	Partisipasi Kampus Dalam Penyelenggaraan Seminar Antikorupsi .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>84</b>
5.1	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>

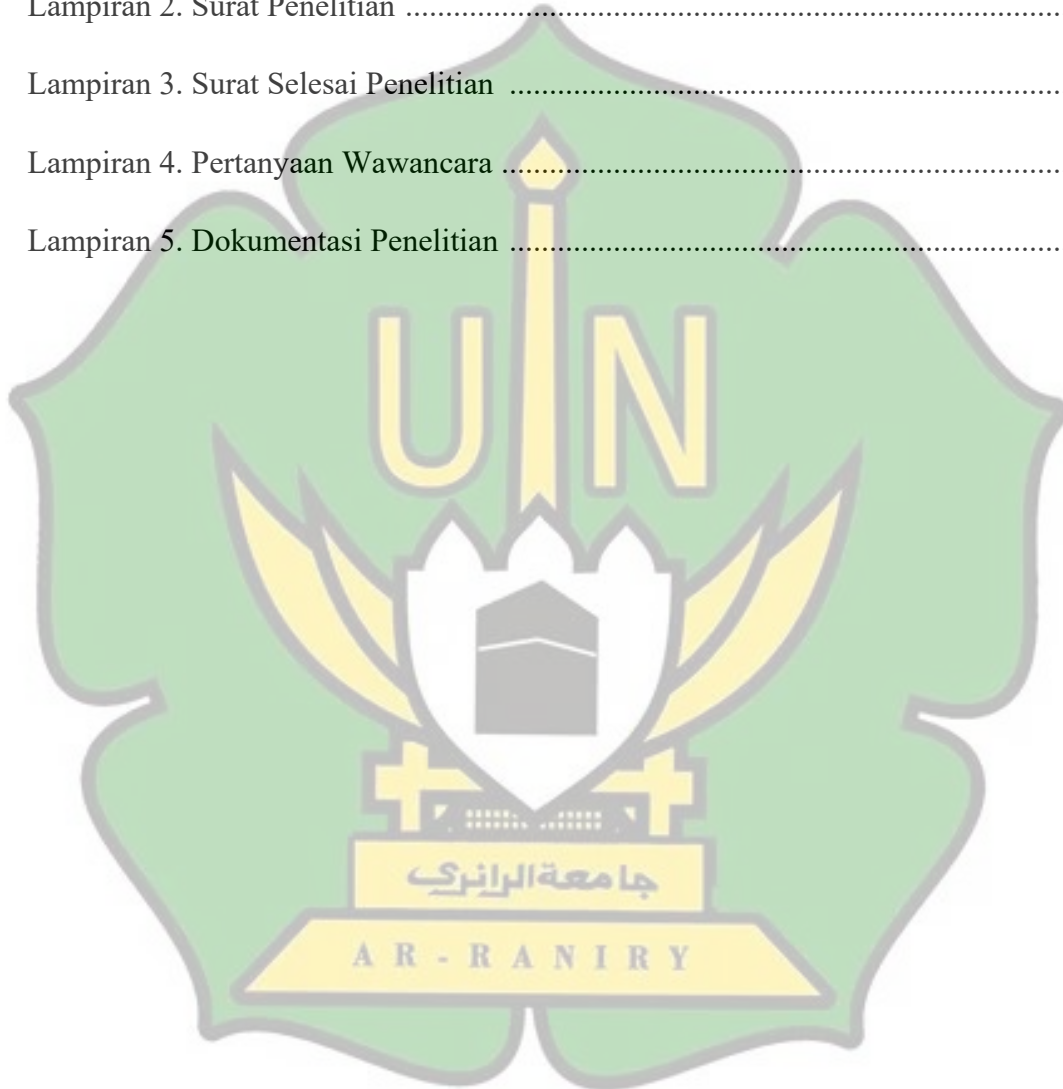
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir.....44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Skripsi .....	92
Lampiran 2. Surat Penelitian .....	93
Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian .....	95
Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara .....	96
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian .....	98



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pengetahuan mahasiswa dalam lingkup korupsi merupakan hal yang sepatutnya harus di mengerti oleh mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa merupakan seorang yang kritis akan tindakan tersebut. Mahasiswa saat ini pada akhirnya akan menggantikan generasi yang lebih tua.<sup>1</sup> Mahasiswa generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, menunjukkan pemahaman yang unik terhadap isu korupsi. Mereka tumbuh di era digital, di mana informasi tentang praktik korupsi dapat diakses dengan mudah melalui internet dan media sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih sadar akan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa generasi ini lebih cenderung untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan institusi, serta aktif dalam kampanye anti-korupsi. Mereka percaya bahwa teknologi, seperti blockchain, dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik korupsi di berbagai sektor.<sup>2</sup>

Generasi Z merupakan sumber yang dinilai paling baik dalam membentuk karakter diri, karena generasi ini dominan memiliki kesempatan untuk menikmati

---

<sup>1</sup> Rusmita, Sari. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 4.01 (2015).

<sup>2</sup> Nugroho, R., & Yudho, A. "Pengaruh Teknologi Terhadap Kesadaran Anti-Korupsi di Kalangan Mahasiswa Generasi Z." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, (2021).

kemudahan dalam dunia pendidikan dibanding dengan generasi terdahulu, sehingga membuat mereka mampu untuk open minded dengan lebih kritis menyikapi isu-isu lokal. Jadi, karena gen Z memiliki kemudahan untuk mengenal dunia digital lebih tinggi dan banyak daripada generasi sebelumnya, Penelitian ini perlu difokuskan pada Generasi Z karena kelompok ini merupakan generasi yang hidup dan tumbuh dalam konteks sosial, politik, dan teknologi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Z dikenal sebagai *digital native* yang sangat dekat dengan arus informasi, media sosial, serta wacana publik, termasuk isu-isu politik seperti korupsi dan transparansi. Intensitas paparan informasi tersebut membentuk cara berpikir, menilai, dan merespons suatu fenomena secara khas, sehingga persepsi mereka menjadi penting untuk dikaji. Selain itu, Generasi Z merupakan calon aktor politik dan sosial di masa depan yang akan berperan dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami persepsi Generasi Z menjadi relevan sebagai upaya membaca kecenderungan sikap dan kesadaran politik generasi penerus dalam menghadapi persoalan publik di Indonesia.<sup>3</sup>

Namun, meskipun pemahaman mereka terhadap korupsi cukup baik, generasi Z juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perubahan. Banyak dari mereka merasa frustrasi dengan lambatnya perubahan dalam sistem yang ada dan sering kali terjebak dalam ketidakpastian politik. Selain itu, pengaruh budaya dan norma sosial di sekitar mereka dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap korupsi.

---

<sup>3</sup> Jannah, Salma Miftakhul, and Agus Satmoko Adi. "Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di Smp Negeri X." *Journal of Civics and Moral Studies* 8.1 (2023): 26-39.

Sebagian besar mahasiswa generasi Z percaya bahwa pendidikan dan kesadaran adalah kunci untuk memberantas korupsi, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut.<sup>4</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan atau lebih dikenal dengan singkatannya yaitu FISIP, sudah ada sejak tahun 2014. Fakultas ini memiliki 2 jurusan pertama Ilmu Politik kedua Ilmu Administrasi Negara. Pada jurusan Ilmu Politik terdapat 61 mata kuliah yang harus diambil diantaranya 60 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah pilihan, dari semua mata kuliah tersebut salah satunya ada mata kuliah Politik Keuangan & Korupsi dan Politik, yang mana mata kuliah ini akan sedikit berkesinambungan dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu tentang korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi dapat diartikan sebagai sebuah fenomena yang tidak normal atau menyimpang dari kewajaran, dan keberadaannya memberikan dampak negatif yang serius terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa serta bernegara. Tindakan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat, termasuk juga nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Dalam pandangan masyarakat luas, korupsi dianggap sebagai sebuah perilaku menyimpang (*deviance*) yang tidak seharusnya terjadi, dan hal ini termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa

---

<sup>4</sup> Sari, D. “*Generasi Z dan Korupsi: Harapan dan Tantangan.*” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (2022).

<sup>5</sup> <https://ar-raniry.ac.id/fakultas/FISIP> di akses pada tanggal 25 September 2025.

(*extraordinary crime*) karena dilakukan secara sistematis oleh kelompok atau individu tertentu yang memiliki kepentingan pribadi.<sup>6</sup>

Secara harfiah, korupsi menggambarkan tindakan yang penuh dengan ketidakjujuran, penyimpangan dari prinsip kesucian, serta mencerminkan keburukan, kebusukan moral, kerusakan akhlak, dan sikap yang mudah tergoda oleh suap, sehingga menjadi contoh dari perilaku yang tidak bermoral dan merusak tatanan etika. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sudah di ubah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, korupsi dijelaskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan bagi pihak lain, atau keuntungan untuk sebuah badan usaha, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya, dan perbuatan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.<sup>7</sup> Dan pasal tersebut dapat di golong kan sebagai berikut :

1. Suap menyuap
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Pemerasan
4. Perbuatan curang

---

<sup>6</sup> Sukiati, "Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi" Surabaya CV. Jakad Media Publishing (2020).

<sup>7</sup> Jannah, Salma Miftakhul, and Agus Satmoko Adi. "Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X." Journal of Civics and Moral Studies, 8.1 (2023).

5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi yang didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas seperti uang, barang, rabat, komisi, tiket, dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan transparansi di Indonesia untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat instuisi pemerintah, dan mencegah korupsi.<sup>8</sup>

Transparansi memegang peranan penting dalam upaya memberantas korupsi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Hal ini merupakan proses yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya transparansi, masyarakat akan lebih leluasa dalam mengakses dan bertukar informasi sesuai dengan kebutuhannya. Secara bertahap, hal ini akan mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan mendekatkan kita pada cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan dasar hukum negara. Terdapat berbagai cara dan model untuk mewujudkan transparansi, salah satunya dengan menyediakan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja pemerintah agar masyarakat dapat memantau secara terbuka. Tujuan dari peningkatan transparansi ini adalah untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan, karena transparansi dapat mendorong perubahan dan memberikan pengaruh pada struktur politik, dunia usaha, lingkungan, dan budaya melalui perbaikan sistem administrasi serta prosedur, baik di level daerah maupun nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.

<sup>9</sup> Rani, Dewi Lingga, Emrinaldi Nur, and Azwir Nasir. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau)." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5.1 (2021).

Di Indonesia sendiri, masih banyak terjadinya tindak korupsi hingga sampai saat ini, hal ini menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara. Persentase dari total nilai korupsi nasional adalah 6,76% dan terdapat 125 kasus korupsi. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan sejumlah kasus korupsi besar, termasuk korupsi PT Timah yang diduga merugikan negara hingga Rp300 Triliun, kasus di PT Asabri yang merugikan negara hingga Rp22,7 Triliun, serta kasus besar lainnya.

Di Aceh sendiri kasus korupsi masih menjadi perhatian serius karena situasinya sangat memprihatinkan dengan temuan kasus secara konsisten, meskipun upaya penindakan hukum juga terus berjalan kasus korupsi hingga saat ini masih dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi di Aceh mencakup berbagai kasus, dengan modus yang umum meliputi merk-up, pengadaan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengelolaan dana desa, program pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat, dan pengadaan barang/jasa. Dalam 5 tahun terakhir kasus korupsi di Aceh mencakup program peremajaan sawit di Aceh Jaya, pemeliharaan jalan dan jembatan di Simeulue, dugaan korupsi dana desa di beberapa kabupaten, dan kasus SPPD fiktif di DPRK Simeulue.

Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk membasmi korupsi di Indonesia, namun masih terkesan belum maksimal dan masih setengah setengah. Keprihatinan dan kekecewaan masyarakat pun muncul dalam upaya pemberantasan

korupsi yang dilakukan pemerintah sehingga tindak pidana korupsi masih saja bertambah dan terjadi begitu saja di Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meng amanatkan pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang harus sejalan dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara.<sup>10</sup> Tingginya harapan masyarakat terhadap terbentuknya lembaga-lembaga publik yang transparan dan bertanggung jawab, serta responsif terhadap kebutuhan warganya dengan memberikan pelayanan yang optimal, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di era globalisasi saat ini. Di tengah masyarakat yang semakin maju dan modern dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, aktivitas pun menjadi lebih cepat dan efisien. Pada umumnya, negara dengan struktur birokrasi yang besar cenderung menghadapi berbagai bentuk inefisiensi. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani justru menuntut dilayani, serta kurangnya keterlibatan publik dalam diskusi kebijakan dan isu-isu politik, maka hal ini memperlemah akuntabilitas pemerintah. Akibatnya, akuntabilitas menjadi aspek penting yang kerap terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 peneliti terdahulu, diantaranya yaitu 1). Karin Hadiyanti dengan judul “Persepsi Perilaku Korupsi Pada Mahasiswa

---

<sup>10</sup> Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.1 (2022).

<sup>11</sup> Sumantri, Ii. "Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia." *Journal of Scientech Research and Development* 5.1 (2023): hal 99

Aktivis”. 2). Endrise Septina Rawanoko dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pendidikan Anti Korupsi”. 3). Sari Rusmita dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi”. Dan terakhir 4). Nalil Khairiah, Nurzannah, dan Nurhasanah Nasution dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan”. Diantara penelitian tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Adapun persamaannya ialah sama-sama ingin mengambil subjek mahasiswa dan objek korupsi, namun yang membedakannya adalah lokus, dan metode penelitian yang akan peneliti gunakan. Mengingat pentingnya partisipasi generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan oleh karena itu maka perlu dilakukan kajian penelitian tentang Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi Dan Transparansi Di Indonesia (Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana Generasi Z melihat korupsi dan pentingnya transparansi. Penelitian ini akan melihat bagaimana pendapat mereka tentang tindak korupsi yang dilakukan serta seberapa aktif mereka terlibat dalam gerakan anti-korupsi. Selain itu, juga akan diungkap harapan mereka terhadap pemerintah untuk meningkatkan transparansi di Indonesia.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembentukan persepsi mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry terhadap korupsi dan transparansi di Indonesia ?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry terhadap korupsi dan transparansi ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry memandang korupsi dan transparansi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu tersebut.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa FISIP terkait korupsi dan transparansi yang telah mereka pelajari dari mata kuliah yang tertera.

### 1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat yang optimal. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi hal hal berikut :

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Generasi Z, tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan, serta dampak dari korupsi.
2. Penelitian dapat memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan dan pemerintah tentang pandangan dan harapan Generasi Z, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsive dan inklusif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Karin Hadiyanti, 2022 dengan judul “*Persepsi Perilaku Korupsi Pada Mahasiswa Aktivis*”. Penelitian ini mengkaji tentang persepsi perilaku korupsi pada mahasiswa aktivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini melibatkan tiga orang mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus sebagai subjek, dengan teknik pengambilan data berupa wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa aktivis cenderung memahami bahwa perilaku korupsi merupakan tindakan yang tidak etis, namun beberapa bentuk tindakan seperti mencontek, titip absen, plagiasi, hingga penggelapan dana organisasi tetap dianggap lumrah dan sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka.<sup>12</sup>

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tindakan seperti kecurangan akademik (contohnya menyontek dan plagiarisme) dan penggelapan dana, dalam organisasi kampus seringkali tidak dianggap sebagai bentuk korupsi yang serius. Bahkan, tindakan pengelembungan anggaran dalam proposal kegiatan organisasi dianggap wajar selama hasilnya digunakan untuk keperluan bersama. Selain itu, bentuk nepotisme seperti memanfaatkan relasi dengan dosen

---

<sup>12</sup> Hadiyanti, K., & Raihana, P. A. *Persepsi Perilaku Korupsi Pada Mahasiswa Aktivis* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta) 2022.

atau pihak kampus untuk kepentingan organisasi juga dianggap sebagai hal yang positif dan bermanfaat.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman etis dan perilaku aktual, di mana mahasiswa sebagai kelompok yang dikenal vokal dalam menentang korupsi justru melakukan praktik-praktik koruptif dalam skala kecil di lingkungan akademik. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perilaku koruptif dapat tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan dan dibenarkan dalam konteks sosial tertentu, terutama di kalangan generasi muda dan organisasi kemahasiswaan.

Dari penelitian di atas, mempunyai persamaan dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama, dengan metode kualitatif deskriptif dan menganalisis subjek yang sama yaitu mahasiswa aktif berorganisasi. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas menganalisis persepsi korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan penelitian ini menganalisis korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Endrise Septina Rawanoko, tahun 2019 berjudul "*Persepsi Mahasiswa terhadap Pendidikan Anti Korupsi melalui Kantin Kejujuran di Universitas Wisnuwardhana Malang*" bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai pendidikan anti korupsi serta efektivitas penerapannya melalui kantin kejujuran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara terhadap 80 mahasiswa FKIP, hasil penelitian menunjukkan bahwa

mayoritas mahasiswa memahami bahwa korupsi adalah tindakan menyimpang yang merugikan negara dan harus diberantas sejak dini. Mahasiswa menilai bahwa pendidikan anti korupsi penting ditanamkan dalam lingkungan kampus, dan kantin kejujuran dinilai sebagai salah satu cara efektif dalam membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Penelitian ini juga menekankan bahwa pendidikan karakter, terutama yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan keadilan, dapat membentuk sikap anti korupsi secara konkret. Kantin kejujuran dianggap bukan sekadar fasilitas, tetapi sebagai sarana implementasi langsung nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiasaan nilai melalui tindakan nyata lebih efektif dalam membentuk karakter antikorupsi dibandingkan hanya sebatas teori.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi. Namun yang membedakannya adalah penelitian di atas berfokus pada pendidikan anti korupsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman Mahasiswa tentang korupsi.

Penelitian ke tiga dilakukan oleh Sari Rusmita, tahun 2015 dengan judul "*Persepsi Mahasiswa Akutansi Terhadap Korupsi*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan (*exposure*) sebagai faktor terjadinya korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>13</sup> Rawanoko, E. S. "*Persepsi Mahasiswa terhadap Pendidikan Anti Korupsi melalui Kantin Kejujuran di Universitas Wisnuwardhana Malang*". *Likhitaprajna*, 21(2), 131-140 (2019).

kuantitatif berupa jumlah sample, yaitu sebanyak 54 sample. Dan hasil yang diterima menyatakan bahwa faktor pengungkapan (*exposure*) berpengaruh signifikan akan terjadinya korupsi. Berdasarkan temuan ini, penelitian kali ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang persepsi mahasiswa padatingkat awal, untuk mengeksplorasi bagaimana mata kuliah dasar dapat membentuk persepsi mereka terhadap korupsi.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan terhadap penelitian di atas yaitu objek penelitiannya. Namun yang membedakan penelitian ini dan penelitian di atas adalah metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Nalil Khairlah, Nurzannah, Nurhasannah Nasution tahun 2015 dengan judul “*Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan*”. Penelitian ini dilakukan di kota medan dengan mengambil 100 sample mahasiswa dari 10 perguruan tinggi, Universitas maupun Akademik. Kriteria penilaian sample adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Teori yang digunakan ialah Pendidikan nilai dan mahasiswa. Salah satu tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan di kota medan, dan ya hasil yang didapat dari reponden ialah good government yang negative karena menunjukkan rentannya terjadi korupsi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rusmita, S. “*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi*”. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 4(01) 2015.

<sup>15</sup> Nalil K. Nurzannah, Nurhasannah N. “*Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan*”, Jurnal Pembangunan Perkotaan, 2015.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terdapat metode penelitian yang sama dan mengambil sample dari beberapa Universitas dan membahas persepsi mahasiswa. Namun yang membedakannya adalah lokasi yang diteliti.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah fokus kajian peneliti yang menitik beratkan kepada persepsi dan pemahaman mahasiswa. Penelitian ini melihat persepsi mahasiswa sebagai suatu proses penerimaan, pengolahan, dan pemaknaan informasi terhadap objek yang diteliti, serta mengkaji tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam memahami isu tersebut

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Persepsi**

Persepsi memiliki beberapa definisi. Menurut Depdiknas persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung yang diperoleh seseorang dari pengamatan terhadap berbagai hal melalui indra. Dalam konteks ini, persepsi jelas merupakan kesan atau tanggapan yang muncul setelah seseorang menyerap informasi mengenai objek tertentu melalui panca indera.<sup>16</sup>

Bimo Walgito mengartikan persepsi sebagai kesan terhadap suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi. Proses ini memungkinkan individu memberikan makna pada objek yang diterima. Pendapat

---

<sup>16</sup> Akbar, Rofiq Faudy. "Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudus." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10.1 (2015).

Bimo melengkapi definisi sebelumnya dengan lebih mendetail mengenai pengolahan informasi yang terjadi setelah penyerapan, di mana gambaran dari panca indera diorganisir dan diinterpretasikan agar memiliki arti bagi individu, dan semua ini berlangsung sebagai satu aktivitas yang terintegrasi.<sup>17</sup>

Robbins mendefinisikan persepsi sebagai kesan yang didapat individu melalui penginderaan yang kemudian dianalisis, diorganisir, diinterpretasikan, dan dievaluasi, sehingga individu mendapatkan makna dari objek tersebut. Pandangan Robbins menambahkan unsur evaluasi atau penilaian terhadap objek persepsi, yang tidak ada dalam penjelasan sebelumnya.

Dari ketiga sumber yang diangkat, terdapat kesamaan, yaitu: 1). Persepsi adalah kesan atau gambaran tentang objek di luar individu. Dan 2). Proses persepsi diperoleh melalui indra.

Perbedaannya adalah:

1. Bimo Walgito memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang proses persepsi, mencakup penyerapan, pengorganisasian, dan interpretasi, sehingga menghasilkan makna yang terintegrasi.
2. Robbins menambahkan elemen evaluasi setelah penyerapan, pengorganisasian, dan interpretasi.

---

<sup>17</sup> Ibid.

Kesimpulannya, persepsi adalah tanggapan gambaran atau kesan mengenai objek yang diperoleh individu melalui panca indera, kemudian diorganisir, diinterpretasi, dan dievaluasi sehingga mendapatkan makna.<sup>18</sup>

Pembentukan perilaku bagaimanapun juga terikat pada persepsi yang dibangun seseorang. Persepsi merupakan salah satu faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Adanya persepsi terhadap suatu objek, peristiwa atau benda, maka akan lahir tindakan yang akan diambil oleh seseorang yang mempersepsikannya. Robbins menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Robbins juga mengatakan bahwa sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan dengan kinerja. Di antara faktor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, inekuitas status, ukuran kelompok, susunan demografinya, tugas dan kekohesifan kelompok. Sementara itu, kinerja organisasi dipandang sebagai akumulasi dari kinerja individual.<sup>19</sup>

Persepsi yang terbentuk pada setiap anggota organisasi bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bahkan terkadang pemaknaanya bersifat kontradiktif dengan fenomena riil yang terjadi di lapangan. Pemilihan individu dalam bersikap, motif yang dibentuk berdasarkan pengalaman, unsur kepentingan untuk pencapaian tujuan, serta pengharapan akan hasil tertentu adalah faktor utama yang

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi peran, konsistensi peran, dan kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(4), 02-02.

mempengaruhinya. Setiap orang pasti mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan. Persepsi yang dimiliki seseorang juga berkaitan dengan pengalaman yang ia miliki sebelumnya dan kemampuan yang diterimanya. Persepsi tumbuh dari dalam tubuh yang telah menganalisis baik dan buruknya suatu kejadian berdasarkan pengalaman hidup. Sebuah proses persepsi yang memunculkan pengalaman subjektif sangat berbeda dari realitas fisik akan membuat kelangsungan hidup hampir meustahil. Fungsi persepsi bukan untuk memberikan kita dengan kesan subjektif lingkungan dan objek signifikan dilingkungan. Sebaliknya, ini adalah penyediaan platform yang efektif untuk tindakan . dalam evolusi istilah fungsi persepsi adalah untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan objek dunia luar disekitar kita.

Menurut Robbins, terdapat dua indikator persepsi:

- a. Penerimaan: Proses ini merupakan indikator terjadinya persepsi secara fisiologis, berkaitan dengan fungsi indra dalam menangkap rangsang dari luar.
- b. Evaluasi: Rangsang yang telah ditangkap kemudian dievaluasi oleh individu. Proses evaluasi ini bersifat subjektif; satu individu mungkin menganggap rangsang tersebut sulit dan membosankan, sementara yang lain bisa menilai hal yang sama sebagai sesuatu yang menarik dan menyenangkan<sup>20</sup>

Sementara menurut Bimo Walgito, terdapat beberapa indikator persepsi sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ibid.

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Proses ini melibatkan penerimaan rangsang oleh panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap, baik secara terpisah maupun bersamaan. Hasil dari penyerapan ini menghasilkan gambaran, tanggapan, atau kesan yang disimpan dalam otak. Gambaran tersebut bisa berupa tunggal atau jamak, tergantung pada objek yang diamati. Di otak terkumpul berbagai gambaran atau kesan, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru saja terbentuk. Kejelasan gambaran ini dipengaruhi oleh jelas tidaknya rangsang, kondisi normal alat indera, serta waktu, apakah itu baru atau sudah lama terjadi.
2. Pengertian atau pemahaman. Setelah terbentuk gambaran-gambaran atau kesan-kesan di otak, proses selanjutnya adalah pengorganisasian dan pengelompokan (klasifikasi) gambaran tersebut. Proses ini juga mencakup perbandingan dan interpretasi, sehingga menghasilkan pengertian atau pemahaman. Proses terbentuknya pengertian ini sangat unik dan cepat, serta dipengaruhi oleh gambaran-gambaran yang sudah ada sebelumnya (disebut sebagai apersepsi).
3. Penilaian atau evaluasi. Setelah pengertian atau pemahaman terbentuk, individu melakukan penilaian. Pada tahap ini, individu membandingkan pengertian baru dengan kriteria atau norma yang telah dimiliki secara

subjektif. Nilai yang diberikan oleh individu bisa bervariasi meskipun objek yang dinilai sama, sehingga persepsi menjadi bersifat individual.<sup>21</sup>

Dari pendapat Robbin, dan Bimo Walgito, indikator-indikator persepsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menurut Robbin:
  1. Penerimaan / penyerapan.
  2. Evaluasi.
- Menurut Bimo Walgito:
  1. Penerimaan.
  2. Mengerti / memahami.
  3. Menilai / evaluasi.

Setelah membandingkan kedua pendapat tersebut, peneliti sependapat dengan Bimo Walgito bahwa indikator persepsi terdiri dari tiga poin, yaitu menyerap, mengerti, dan menilai (evaluasi). Peneliti memilih untuk merujuk pada pendapat Bimo Walgito karena dinilai lebih komprehensif dibandingkan dengan pendapat Robbin. Indikator-indikator ini sangat berguna dalam mengembangkan instrumen untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap isu korupsi dan transparansi.<sup>22</sup>

### 2.2.2 Teori Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin : *corruption* yang berarti penyuaipan / *corruotore* merusak, korupsi merupakan gejala yang mana para pejabat atau badan

<sup>21</sup> Akbar, R. F. (2015). Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).

<sup>22</sup> Andi Syahputra and Heri Rahmatsyah Putra, 'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT ( KPM )', 1–20.

negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan pemalsuan dan ketidakberesan lainnya. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang mana jika kita lihat dari struktur bahasa serta penyampaian yang berbeda, namun pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

1. Korup ( busuk, suka menerima suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya)
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan lain lain)
3. Koruptor ( pelaku korupsi)

Jack Bologne menyatakan bahwa perilaku korupsi berakar pada keserakahan dan ketamakan. Pandangan ini dijelaskan melalui teori yang dikenal dengan akronim GONE, yang meliputi Keserakahan, Peluang, Kebutuhan, dan Pengungkapan (pengungkapan atau penegakan hukum). Kombinasi keempat faktor ini dapat dengan mudah mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Keserakahan, disertai dengan peluang yang terbuka, dan didorong oleh berbagai kebutuhan, akan memicu niat seseorang untuk melakukan korupsi. Niat ini semakin diperkuat ketika didukung oleh penegakan hukum yang lemah, seperti peraturan yang tidak jelas dan sanksi yang ringan, yang tidak memiliki efek jera terhadap pelaku korupsi.<sup>23</sup>

Teori ini kelihatan sangat tepat untuk menggambarkan situasi Korupsi di Indonesia saat ini. Secara umum, korupsi terjadi melalui empat variabel ini.

---

<sup>23</sup> Wilhelmus, Ola Rongan. "Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17.9 (2017): 26-42.

Kebutuhan dan keserakahan seseorang untuk melakukan korupsi semakin difasilitasi oleh peluang yang mereka terima sebagai pejabat yang memegang posisi atau jabatan di tempat atau lingkungan kerja tertentu. Posisi dan jabatan ini menciptakan peluang untuk korupsi. Peluang ini didukung oleh hukuman pidana yang tidak proporsional dengan keuntungan besar yang dapat diperoleh seseorang dari korupsi, serta perilaku petugas penegak hukum yang mudah disuap untuk meminimalkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Vroom menganggap nilai-nilai sebagai variabel penting yang menentukan harapan dan motivasi bertindak dalam kehidupan seseorang. Motivasi seseorang sangat bergantung pada harapan yang ingin mereka capai. Jika seseorang berharap menjadi kaya, maka motivasi mereka untuk bekerja adalah untuk menjadi kaya. Masalah muncul ketika kemampuan seseorang untuk menjadi kaya tidak sesuai dengan harapan. Dalam situasi ini, nilai-nilai seseorang akan menentukan apakah mereka harus bertindak dengan cara yang benar atau cara yang salah (korup) untuk menjadi kaya. Berkaitan dengan kasus korupsi, nilai-nilai yang tertanam dalam diri para pelaku korupsi tentu saja adalah nilai-nilai yang salah, seperti ketidakjujuran, kejahatan, ketidakadilan, harga diri, dan sebagainya. Nilai-nilai ini mengarahkan keinginan seseorang untuk memperkaya diri melalui cara yang salah atau melanggar hukum.<sup>24</sup>

Teori Vroom menunjukkan bahwa nilai-nilai seseorang secara signifikan menentukan jalan yang mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu,

---

<sup>24</sup> Ibid Hal. 31

jika nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja salah atau bertentangan dengan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, nilai-nilai tersebut akan mendorong atau memotivasi seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Misalnya, saat ini, sebagian besar elit legislatif, eksekutif, dan yudisial menganggap menerima uang untuk mengamankan suatu proyek sebagai hal yang normal atau biasa. Namun, menerima uang dengan maksud untuk mengamankan suatu proyek atau tender merupakan bentuk gratifikasi/korupsi.<sup>25</sup>

Teori ini (teori Klitgard) secara akurat menggambarkan berbagai kasus korupsi yang terjadi di tingkat pembuat kebijakan (pejabat) yang memegang otoritas atau kekuasaan tertentu. Klitgard menjelaskan bahwa korupsi di tingkat pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena "monopoli kekuasaan" yang dipegang oleh seorang pemimpin, ditambah dengan tingkat diskresi pejabat yang tinggi, dan kurangnya pengawasan yang memadai (kurangnya akuntabilitas) dari otoritas pengawas. Situasi ini dapat dengan mudah menimbulkan korupsi.

Di Indonesia, korupsi menggunakan mekanisme ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada era Orde Baru, yang mendominasi berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lainnya. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menciptakan berbagai kebijakan. Namun, kekuasaan pemerintah Orde Baru ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang kuat dari DPR (DPR). Hal ini karena kekuasaan DPR pada era Orde Baru praktis lumpuh,

---

<sup>25</sup> Ibid Hal. 31-32

karena hanya digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah. Situasi ini membuka peluang bagi pejabat dari berbagai tingkatan untuk terlibat dalam korupsi.<sup>26</sup>

Korupsi saat ini semakin meluas. Tindak korupsi tidak lagi semata-mata dipicu oleh dorongan ekonomi sebagaimana dijelaskan Klitgaard dan Rose-Ackerman, tetapi juga oleh motif lain, termasuk keinginan mempertahankan kekuasaan politik. Praktik korupsi di sektor publik sering berkaitan erat dengan kepemimpinan politik. Korupsi politik umumnya terjadi pada tingkat otoritas tertinggi, terutama dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk memberi keuntungan bagi politisi maupun anggota legislatif. Di Indonesia, kasus korupsi yang melibatkan politisi dan legislator paling banyak muncul dalam proses penyusunan anggaran, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Di negara-negara berkembang, korupsi cenderung lebih parah dibandingkan negara maju. Hal ini terjadi karena pejabat publik memiliki ruang diskresi yang besar tanpa diimbangi sistem pengawasan yang memadai, sehingga peluang untuk melakukan penyimpangan semakin terbuka. Selain itu, penegakan hukum di negara berkembang juga relatif lemah. Hukuman yang dijatuhkan tidak mampu menimbulkan efek jera, sehingga praktik korupsi terus berlanjut. Padahal, dampak korupsi sangat merugikan: ia mendistorsi pengeluaran pemerintah, mengacaukan

---

<sup>26</sup> Ibid Hal. 32

alokasi sumber daya, dan mengurangi kepercayaan investor untuk menanamkan modal di negara dengan tingkat korupsi tinggi.<sup>27</sup>

#### a. Sebab Sebab Korupsi

Sejumlah kondisi mendukung munculnya korupsi: (1) Konsentrasi kekuasaan pada para pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat dalam rezim otoriter; (2) Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah; (3) Kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran melebihi biaya politik normal; (4) Proyek yang melibatkan sejumlah besar uang publik; (5) Lingkungan tertutup yang menguntungkan kepentingan pribadi dan jaringan kolega; (6) Penegakan hukum dan ketertiban yang lemah; (7) Kurangnya kebebasan berekspresi atau kebebasan media massa; (8) Gaji yang sangat rendah untuk pegawai pemerintah; (9) Masyarakat yang apatis, mudah tertipu oleh penguasa yang gagal memberikan perhatian kepada publik seperti yang mereka janjikan selama kampanye pemilihan; dan (10) Kontrol yang tidak memadai untuk mencegah penyuapan atau "*sumbangan kampanye*."<sup>28</sup>

Ada beberapa penyebab korupsi. Singh (India, 1978) dalam Simon (1982) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab korupsi di India adalah kelemahan moral (41,30%), tekanan ekonomi (23,80%), hambatan struktural administratif (17,20%), dan hambatan struktural sosial (7,08%). Sementara itu, American (1980)

---

<sup>27</sup> Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.

<sup>28</sup> Pembangunan Politik, 'JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPehI (VOL 3, No 02 2022) 40', 3.02 (2022), 40–59.

dalam Simon (1982) menyatakan penyebab korupsi sebagai berikut: (1) Warisan pemerintahan kolonial, (2) Kemiskinan dan ketidaksetaraan, (3) Upah rendah, (4) Persepsi masyarakat tentang korupsi, (5) Regulasi yang berbelit-belit, dan (6) Kurangnya pengetahuan di bidang tersebut.<sup>29</sup>

Di sisi lain, Herbert Simon (1982) sendiri menyimpulkan bahwa beberapa penyebab korupsi adalah: (1) Perumusan legislatif yang tidak memadai; (2) Administrasi yang lambat, mahal, dan tidak fleksibel; (3) Tradisi menambah penghasilan pejabat pemerintah yang sedikit dengan upeti atau suap; (4) Korupsi dianggap normal dan tidak dianggap salah secara moral, sehingga mendorong orang untuk terlibat dalam korupsi; dan (5) Ketika orang-orang tidak menghormati aturan resmi dan tujuan organisasi.<sup>30</sup>

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi adalah sebagai berikut: (1) Hukum dan peraturan yang tidak lengkap; (2) Administrasi yang lambat dan terlalu birokratis; (3) Tingkat kesejahteraan dan gaji karyawan yang rendah; (4) Warisan pemerintahan feodal dan kolonial dalam bentuk upeti; dan (5) Mentalitas karyawan yang ingin cepat kaya melalui cara yang tidak sah; (6) Kurangnya pengetahuan tentang bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; dan (7) Kurangnya kesadaran etika dan kewarganegaraan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid Hal. 43

<sup>30</sup> Ibid Hal. 45

<sup>31</sup> Ibid

## **b.Faktor Terjadinya Korupsi**

### **Faktor Pribadi**

Faktor pribadi merupakan salah satu faktor kriminogenik yang paling jelas dalam korupsi. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti motivasi pribadi, ambisi yang berlebihan, ketidakpuasan, dan nilai-nilai moral individu dapat memicu korupsi. Beberapa individu terlibat dalam praktik korupsi karena dorongan untuk memperoleh kekayaan pribadi dengan cepat dan aman, yang seringkali lebih menggoda daripada cara yang sah. Misalnya, pejabat publik atau pegawai negeri yang merasa pendapatan mereka tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan dan gaya hidup yang mereka inginkan mungkin melihat korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kecenderungan ini seringkali lebih kuat ketika individu tidak merasakan konsekuensi nyata atau pengawasan ketat terhadap tindakan mereka.<sup>32</sup>

Selain itu, ambisi yang berlebihan juga dapat memicu individu untuk terlibat dalam korupsi. Beberapa pejabat publik memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai posisi tertentu atau memperoleh kekayaan yang lebih besar, membuat mereka rela melakukan apa saja, termasuk melakukan korupsi, untuk mencapai tujuan mereka. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan politik juga dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam korupsi. Ketidakpuasan ini muncul ketika individu merasa mereka tidak menerima pengakuan atau penghargaan yang pantas mereka dapatkan atas upaya yang mereka curahkan dalam pekerjaan mereka.

---

<sup>32</sup> Fakultas Hukum and others, 'Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik Henny Yuningsih', 30.4 (2024), 131–142.

Pada titik ini, mereka mungkin merasa berhak mendapatkan lebih, dan mereka melihat korupsi sebagai cara untuk mengimbangi ketidakpuasan ini.<sup>33</sup>

### **Faktor Organisasi dan Struktural.**

Selain faktor pribadi, faktor organisasi dan struktural juga memainkan peran penting dalam mendorong korupsi di sektor publik. Struktur birokrasi dalam organisasi pemerintah atau lembaga publik dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Birokrasi yang kompleks dan lambat seringkali mengandung prosedur yang rumit dan tidak transparan, sehingga sulit untuk memantau kebijakan atau keputusan. Ketika pejabat publik memiliki wewenang untuk mengendalikan berbagai prosedur administrasi dan keuangan, mereka sering kali memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok.<sup>34</sup>

Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak jelas dalam suatu organisasi dapat menciptakan peluang bagi pejabat untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atau bahkan menyalahgunakan posisi mereka. Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika tidak ada sistem yang jelas untuk mengawasi proses pengadaan atau jika proses pengadaan tidak dilakukan dengan transparansi yang memadai, ini membuka peluang bagi pejabat untuk menerima suap atau menggelembungkan anggaran. Dalam konteks ini, sistem birokrasi yang tidak efisien dan tidak transparan memberikan ruang yang cukup bagi korupsi untuk berkembang. Struktur organisasi yang kurang memiliki pengawasan internal yang efektif juga

---

<sup>33</sup> Ibid Hal. 136

<sup>34</sup> Ibid

berkontribusi pada tingkat korupsi yang tinggi. Ketika pengawasan lemah, pejabat atau karyawan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan merasa aman dan tidak takut akan sanksi atau hukuman. Sistem pelaporan yang tidak memadai dan tidak adanya jaminan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindakan korupsi dapat memperburuk situasi ini. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan prosedur yang jelas, praktik korupsi dapat berkembang tanpa hambatan, karena individu yang terlibat merasa tidak ada yang memantau atau mengendalikan tindakan mereka.<sup>35</sup>

### **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendorong korupsi di sektor publik. Dalam konteks ekonomi, ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan ekonomi antara pejabat publik dan masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan yang mendorong individu untuk terlibat dalam korupsi. Ketika pejabat publik merasa bahwa pendapatan mereka tidak sebanding dengan gaya hidup yang mereka inginkan, mereka mungkin mencari jalan pintas untuk meningkatkan kekayaan mereka. Dalam hal ini, korupsi menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada mengikuti prosedur yang sah dan legal.<sup>36</sup>

Krisis ekonomi atau situasi ekonomi yang tidak stabil juga dapat meningkatkan potensi korupsi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana banyak pihak menghadapi kesulitan keuangan, korupsi dapat dilihat sebagai cara untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan. Selama krisis ekonomi, pejabat atau

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

pegawai negeri mungkin merasa bahwa mereka dapat "mengambil sedikit" dari anggaran negara atau dana publik tanpa diketahui siapa pun, dengan alasan bahwa mereka juga mengalami kesulitan. mereka juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, tingkat korupsi cenderung meningkat.<sup>37</sup>

Faktor ekonomi juga berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dikelola oleh sektor publik. Ketika sumber daya terbatas dan pengawasan tidak memadai, pejabat yang memiliki akses ke dana tersebut dapat menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Lebih lanjut, di sektor-sektor dengan nilai ekonomi tinggi, seperti konstruksi, pengadaan barang dan jasa, dan sektor energi, peluang terjadinya korupsi meningkat karena melibatkan arus kas besar yang tidak selalu dipantau dengan benar.<sup>38</sup>

### **Faktor Budaya dan Sosial**

Faktor budaya dan sosial juga memengaruhi tingkat korupsi di sektor publik. Di beberapa negara, budaya suap dan pemberian hadiah telah menjadi norma sosial yang diterima dan tidak dianggap ilegal. Dalam budaya seperti itu, banyak orang yang terlibat di sektor publik menganggap suap atau hadiah sebagai "pajak tak terlihat" yang harus dibayar untuk menjalankan tugas mereka. Bahkan, di beberapa tempat, suap dapat dilihat sebagai cara yang sah untuk mempercepat proses atau mendapatkan layanan publik yang lebih baik. Nilai-nilai sosial yang berlaku juga memengaruhi pandangan tentang korupsi. Dalam masyarakat dengan toleransi tinggi

---

<sup>37</sup> Ibid Hal. 137

<sup>38</sup> Ibid

terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau menerima suap sering dianggap normal dan tanpa rasa malu. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dan pejabat publik mengabaikan korupsi sebagai masalah utama, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk melanjutkan praktik korupsi tanpa menganggap ada yang salah dengan tindakan mereka. Sebaliknya, di negara-negara dengan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana norma kejujuran dan integritas sangat dihargai, korupsi lebih sulit berkembang karena masyarakat dan lembaga publik tidak mentolerirnya.

Di beberapa masyarakat, ketidaksetaraan sosial juga dapat memperburuk praktik korupsi. Ketika terdapat kesenjangan sosial yang tajam, individu yang merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial cenderung mencari cara untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, dan korupsi dapat menjadi salah satu jalan untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Dalam konteks ini, korupsi sering dilihat sebagai respons terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada.<sup>39</sup>

### **c. Dampak Korupsi**

#### **Dampak Ekonomi**

Korupsi memiliki dampak destruktif pada berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, yang merupakan faktor terpenting bagi kesejahteraan publik. Mauro menyatakan bahwa korupsi memiliki korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, dan pengeluaran untuk pembangunan sosial dan program kesejahteraan publik). Hubungan negatif langsung antara korupsi dan kehidupan ekonomi ini harus dilihat

---

<sup>39</sup> Ibid Hal. 138

sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk bekerja keras memerangi korupsi, baik secara preventif maupun represif.

Korupsi mengakibatkan inefisiensi pembangunan, kenaikan biaya barang dan jasa, dan peningkatan utang nasional yang pesat. Inefisiensi pembangunan terjadi ketika pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, tetapi kebijakan-kebijakan ini selalu disertai dengan praktik korupsi yang merajalela. Misalnya, anggaran perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kemajuan ekonomi malah dialokasikan ke kantong pribadi para pejabat dan birokrat.

Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis manajemen karena kebutuhan untuk bernegosiasi dengan pejabat yang korup. Kegagalan dalam negosiasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian kerja sama ekonomi, termasuk kerja sama di bidang investasi ekonomi. Sampai saat ini, kerja sama investasi antara pemerintah dan pihak domestik (PMDN) atau asing (PMA) untuk pembangunan nasional dan masyarakat sering menghadapi kesulitan karena berbagai faktor, termasuk korupsi dan ketidakpastian hukum. Berbagai organisasi ekonomi internasional, serta pengusaha domestik dan asing, telah lama menyadari bahwa korupsi yang merajalela di suatu negara merupakan ancaman serius bagi investasi ekonomi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wilhelmus, Ola Rongan. "Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17.9 (2017): 26-42.

### **Dampak Sosial**

Korupsi pada dasarnya menciptakan lingkungan ekonomi berbiaya tinggi. Hal ini terjadi karena beban (*high cost economy*) yang ditanggung oleh pelaku ekonomi akibat korupsi, yang mengakibatkan harga tinggi untuk kebutuhan pokok, jasa, dan layanan publik. Harga yang diterapkan pada barang, jasa, dan layanan publik pokok harus menutupi kerugian yang diderita oleh pelaku ekonomi akibat korupsi dan penyelewengan.

Mengenai kemiskinan, korupsi semakin mempersulit masyarakat miskin untuk mengakses layanan ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan layanan lainnya. Harga komoditas pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya semakin tinggi. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak menderita kekurangan gizi dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Korupsi semakin meminggirkan kaum miskin.<sup>41</sup>

### **Runtuhnya Otoritas Pemerintahan**

Korupsi telah menembus aspek-aspek paling mendasar kehidupan karena secara langsung terkait dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan). Siapa pun yang berbicara tentang kejujuran akan dikenai sanksi sosial, politik, ekonomi, dan keuangan oleh otoritas pemerintah, aparaturnya, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus menghadapi rasa takut dari mereka yang berkuasa dan kekuasaan politik. Rasa takut ini sebenarnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa.

---

<sup>41</sup> Ibid Hal. 37-38

Saat ini, kekuasaan politik tetap sangat dominan dan dengan mudah melindungi anggotanya dengan segala cara yang diperlukan, bahkan jika anggota tersebut jelas-jelas telah melakukan tindakan korupsi.

Melindungi pelaku korupsi dengan kekuasaan politik merupakan indikasi utama runtuhnya etika sosial dan politik di negara ini. Banyak pejabat negara, perwakilan, atau pemimpin partai politik tingkat tinggi yang tertangkap dalam korupsi. Namun banyak dari mereka terus dilindungi, tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan korupsi mereka. Sebaliknya, mereka bertindak seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Hal ini terjadi karena ada persepsi bahwa mereka akan dibebaskan dari tuduhan korupsi atau bahwa mereka dapat dengan mudah membayar suap kepada penegak hukum untuk menghindari jebakan korupsi.<sup>42</sup>

### **2.2.3 Teori Good Governance (prinsip transparansi)**

Menurut UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan pelaksanaan kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi yang bertujuan untuk mengelola urusan nasional pada berbagai tingkatan serta menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan integritas. Ini berfungsi sebagai alat untuk kebijakan nasional dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penyelenggara negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Tuntutan ini tidak saja

---

<sup>42</sup> Ibid Hal. 38

berasal dari masyarakat Indonesia melainkan juga dari masyarakat internasional.<sup>43</sup> Keberhasilan *good governance* merupakan syarat penting untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Tata kelola yang baik dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>44</sup>

Yoserizal menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang belakangan ini sering digunakan dalam ilmu politik, khususnya pemerintahan dan administrasi publik. Konsep ini muncul sejalan dengan konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat berkelanjutan.<sup>45</sup>

Pada akhir dekade terakhir, konsep tata kelola pemerintahan yang baik semakin banyak digunakan dalam reformasi publik. Cita-cita rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi 1945, adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Amanat ini tidak akan terwujud jika tata kelola pemerintahan kacau dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam aparat negara tetap merajalela. Oleh karena itu, membangun tata kelola pemerintahan yang baik harus

---

<sup>43</sup> Elvira, Ilma Dwi, Afifuddin Afifuddin, and Langgeng Rachmatullah Putra. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)." *Respon Publik* 19.1, 73-82, 2025.

<sup>44</sup> Peters, B. Guy, and Jon Pierre. "Citizens versus the new public manager: The problem of mutual empowerment." *Administration & Society* 32.1, 9-28, 2000.

<sup>45</sup> Majid, Jamaluddin. "Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11.2 (2021): 186-205.

menjadi agenda utama rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diabadikan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip yang mengatur tata kelola pemerintahan harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah: pertama, prinsip kepastian hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, prinsip tata kelola yang tertib berarti negara dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta visi dan misinya.<sup>46</sup>

Transparansi berasal dari kata "transparansi," yang merupakan kata sifat. "Transparan" mengacu pada keadaan yang transparan. Transparan adalah materi yang jernih, tembus pandang, nyata, dan jelas. Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan pemerintah. Akuntabilitas adalah tingkat yang menunjukkan sejauh mana tanggung jawab aparat terhadap kebijakan dan proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.<sup>47</sup>

Good governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikatornya, indikator yang sering dinilai dalam kinerja pemerintahan

---

<sup>46</sup> Ibid Hal. 192

<sup>47</sup> Ibid Hal. 193

adalah transparansi, akuntabiliti, responsivitas, efisisensi, dan partisipasi. Indikator tersebut membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap pemerintah, mendorong pembangunan yang inklusif, serta menghadirkan tata kelola yang adaptif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi dan partisipasi public yang lebih aktif.<sup>48</sup>

#### 2.2.4 Konsep Pemahaman (Taksonomi Bloom)

Sejarah taksonomi bloom bermula Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tassein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. ketika awal tahun 1950-an, dalam Konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hapalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hapalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir (*thinking behaviors*). Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom, Englehart, Furst, Hill dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan Taxonomy Bloom. Jadi, Taksonomi Bloom adalah struktur hierarkhi yang mengidentifikasi

---

<sup>48</sup> Tiara Dian Nugraha, 'Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lamongan', *Jurnal Equilibrium*, 2 (2025), 25-31

skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) yaitu : (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi; ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran individu; sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan dan tindakan konkret. Namun, penelitian yang menekankan pemahaman konseptual umumnya lebih berfokus pada ranah kognitif karena ranah ini dapat diukur secara sistematis dan terstruktur.<sup>49</sup>

Ranah kognitif mengurutkan keterampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ranah kognitif ini terdiri dari enam tingkatan yaitu : (1) *knowledge* (pengetahuan), (2) *comprehension* (pemahaman atau persepsi), (3) *application* (penerapan), (4) *analysis* (penguraian atau penjabaran), (5) *synthesis* (pemaduan), dan (6) *evaluation* (penilaian). Tingkat pemahaman menempati posisi penting karena menghubungkan kemampuan mengingat informasi dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada tahap ini, individu tidak hanya menghafal informasi tetapi mampu memahami makna, menafsirkannya, menjelaskannya kembali dengan kata-kata mereka sendiri, dan memberikan contoh yang relevan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> 'Taksonomi Bloom', 1942.

<sup>50</sup> Ina Magdalena and others, 'Tiga Ranah Taksonomi Bloom Dalam Pendidikan', 2, 132–39.

Ranah kognitif adalah aspek kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, penalaran, atau pemikiran. Bloom mengklasifikasikan ranah kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori yang disusun secara hierarkis, dengan setiap tingkatan membutuhkan penguasaan tingkatan di bawahnya. Keenam tingkatan tersebut adalah:

a. Pengetahuan (*knowlegde*)

Tujuan pembelajaran pada tingkat mengingat mengharuskan mahasiswa untuk dapat mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya, seperti fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya. Pada tingkat ini, masiswa diharapkan dapat mengenali dan mengingat kembali pengetahuan dasar yang telah dipelajari sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada tingkat Mengingat memberikan dasar bagi mahsiswa untuk mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam taksonomi Bloom.

b. Pemahaman (*comprehension*)

Kategori Pemahaman berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya menggunakan kata-kata mereka sendiri. Pada tingkat ini, mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan atau menyatakan kembali informasi yang telah dipelajari menggunakan bahasa mereka sendiri. Dengan kata lain, pada tingkat pemahaman, mahasiswa tidak hanya mengingat, tetapi juga dapat menafsirkan dan

mengkomunikasikan informasi yang telah mereka pelajari dengan kata-kata mereka sendiri.

c. Penerapan (*application*)

Kategori penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke situasi baru dan memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat ini, mahasiswa dituntut untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, pada tingkat Aplikasi, mahasiswa tidak hanya dapat mengingat dan memahami konsep tetapi juga menggunakan pengetahuan ini dalam situasi baru untuk memecahkan masalah.

d. Analisis (*analysis*)

Tingkat Analisis dalam Taksonomi Bloom melibatkan kemampuan untuk memecah informasi menjadi komponen yang lebih kecil, mencari pola dan hubungan, serta memahami prinsip-prinsip pengorganisasiannya. Pada tingkat ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen, menganalisis hubungan antar komponen, dan mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian suatu fenomena. Dengan keterampilan analitis, siswa tidak hanya mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan, tetapi juga dapat memecah informasi menjadi komponen yang lebih rinci, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta menarik kesimpulan berdasarkan analisis mereka.

e. Sintesis (*synthesis*)

Kategori Sintesis dalam Taksonomi Bloom didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghubungkan dan menyatukan berbagai elemen dan komponen pengetahuan yang ada untuk membentuk pola baru yang lebih komprehensif.

Pada tingkat ini, mahasiswa dituntut untuk menggabungkan berbagai informasi menjadi rencana, struktur, atau produk baru. Kemampuan untuk mensintesis mewakili tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya dalam Taksonomi Bloom.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Kategori Evaluasi adalah tingkat tertinggi dalam Taksonomi Bloom, yang mengharapkan mahasiswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu ide, metode, produk, atau objek menggunakan kriteria tertentu. Pada tingkat Evaluasi, siswa tidak hanya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mensintesis informasi, tetapi juga dapat memberikan penilaian atau membenaran berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Keterampilan evaluasi adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

Dengan perkembangan ilmu pendidikan, Taksonomi Bloom kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, yang menekankan penggunaan kata kerja operasional yang lebih aktif. Dalam taksonomi yang direvisi ini, pemahaman mencakup kemampuan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengklasifikasikan, meringkas, membandingkan, dan menyimpulkan informasi. Revisi ini menekankan bahwa

pemahaman adalah proses berpikir aktif yang melibatkan pengolahan informasi secara mendalam, bukan hanya penerimaan informasi secara pasif.<sup>51</sup>

Dalam penerapannya, Taksonomi Bloom memberikan panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kerangka kerja ini membantu pendidik memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, dari keterampilan berpikir dasar hingga tingkat lanjut. Lebih lanjut, Taksonomi Bloom juga memfasilitasi pengembangan alat evaluasi yang relevan dengan hasil pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, kerangka kerja ini tidak hanya membantu menciptakan pengalaman belajar yang sistematis tetapi juga memastikan bahwa pembelajaran terjadi secara bertahap dan terstruktur.

Penerapan Taksonomi Bloom juga berdampak luas pada pendidikan di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kerangka kerja ini selaras dengan kebutuhan untuk mengembangkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter, nilai-nilai, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks global, Taksonomi Bloom juga relevan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0, yang menuntut keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, Taksonomi Bloom digunakan adalah ranah kognitif sebagai landasan teoritis untuk menganalisis pemahaman mahasiswa tentang korupsi

---

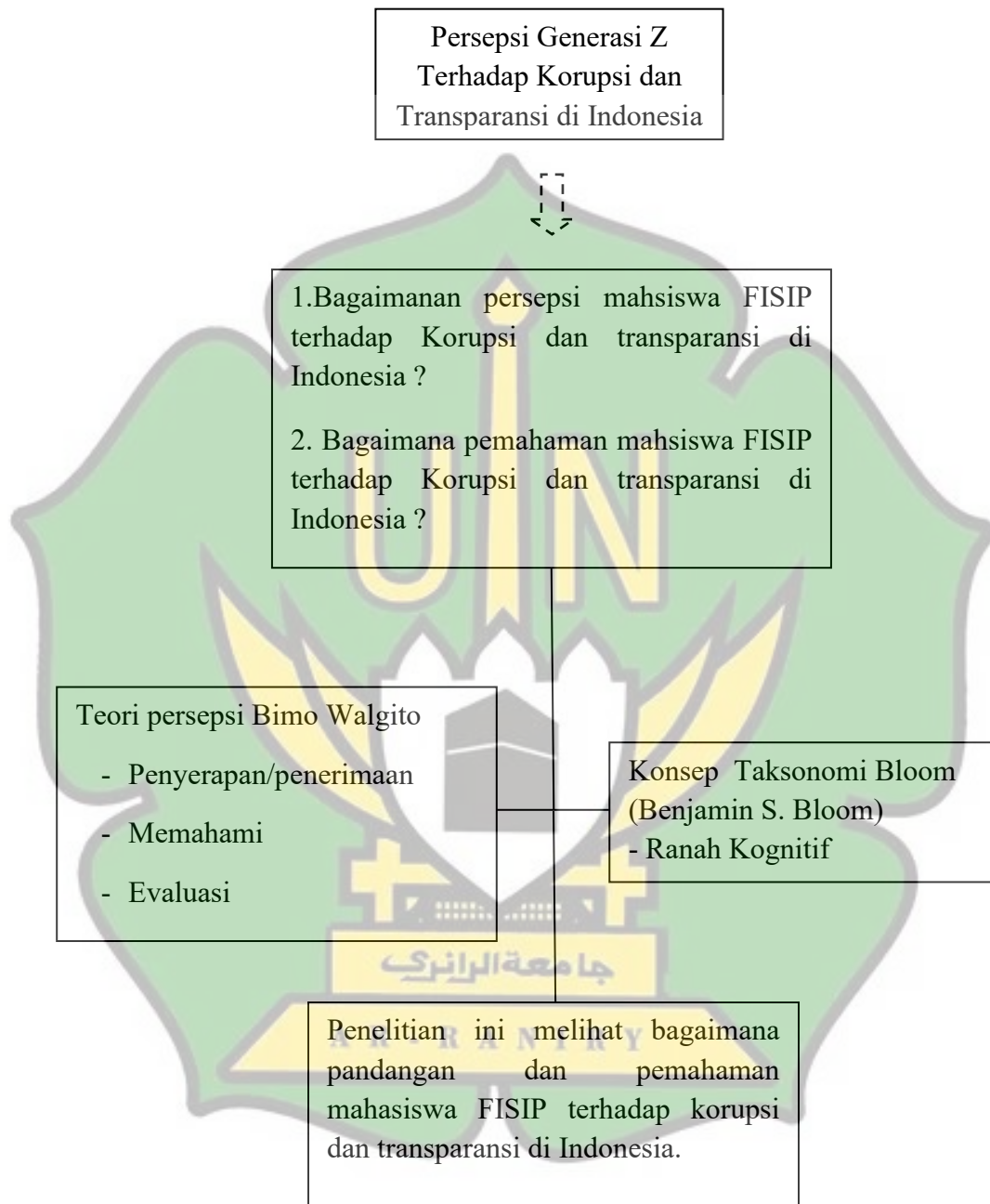
<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Muhammad Afif Marta and others, 'Konsep Taksonomi Bloom Dalam Desain Pembelajaran', " *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 3.1 (2025): 227-246..

dan transparansi. Pemahaman mahasiswa tidak hanya diukur dari kemampuan mengetahui definisi dan konsep dasar, tetapi juga dari kemampuan menafsirkan penyebab dan dampak korupsi, mengaitkan konsep transparansi dengan realitas sosial, serta memberikan penilaian kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Taksonomi Bloom memberikan kerangka yang sistematis dan komprehensif dalam mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isu korupsi dan transparansi.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir atau alur logis adalah penjelasan sistematis yang menggambarkan bagaimana peneliti menghubungkan antara teori, konsep, dan variabel dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dari “ Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi dan Trasparansi di Indonesia.” Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman mahasiswa FISIP terhadap korupsi dan transparansi di Indonesia dibentuk melalui interaksi antara pelaku persepsi (mahasiswa), objek yang dipersepsikan (korupsi dan transparansi), serta situasi lingkungan akademik dan sosial. Proses persepsi berlangsung melalui tahapan penerimaan, pemahaman, dan evaluasi, sehingga menghasilkan persepsi dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isu korupsi dan transparansi.



**Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan peneliti ambil bertepatan di UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik, yang mana UIN Ar-Raniry ini merupakan instansi perguruan tinggi Negeri yang berada di Banda Aceh, yang terletak di Jl. Syekh Abdul Rauf, Lrg. Ibnu Sina No.02, Kopelma Darussalam.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.<sup>53</sup> Metode penelitian kualitatif yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penemuannya. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh informasi

---

<sup>53</sup> Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

mengenai Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia (Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

### 3.3 Metode pengumpulan Data

Data Data Dalam suatu penelitian teknik atau instrument pengumpulan data adalah hal sangat penting untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk proses analisis data lebih lanjut. Adapun instrumen pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu:

#### 3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan informan dalam bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Pada tahap ini peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada informan. Pada proses ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan jenis wawancara terstruktur atau secara terbuka dimana peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum di tanyakan kepada informan dan pada proses ini peneliti hanya terfokus pada pertanyaan yang telah di buat sebelumnya dan tidak menimbulkan pertanyaan baru dari jawaban yang telah di informan sampaikan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

### 3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat dari pengumpulan data. Data-data yang telah dikumpulkan pada metode ini cenderung pada data sekunder, dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### a. Kredibilitas

Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi, tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan, dan triangulasi.<sup>55</sup> Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya.

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 330.

### 3.4 Saturasi Data

Saturasi data merupakan pengumpulan data tambahan tidak lagi menghasilkan wawasan, tema, atau kategori baru yang signifikan. Saturasi data dalam penelitian kualitatif tidak lagi menghasilkan informan baru yang relevan, sehingga peneliti dapat menghentikan proses tersebut. Konsep ini krusial untuk memastikan efisiensi dan validitas hasil riset, terutama pada metode seperti wawancara mendalam atau observasi. Saturasi membantu menghindari pengumpulan data berlebih sambil menjamin tema utama sudah stabil.

Saturasi data dapat dipahami sebagai titik jenuh dalam proses pengumpulan data penelitian. Pada saat peneliti mencapai saturasi, data yang diperoleh dari responden tambahan tidak lagi memberikan wawasan atau informasi baru. Artinya, pola, tema, atau kategori yang muncul dari data sebelumnya sudah konsisten dan berulang. Dalam praktiknya, peneliti sering mengalami dilema tentang berapa banyak data yang harus dikumpulkan. Saturasi data hadir sebagai pedoman bahwa bukan jumlah responden atau data yang menentukan kualitas penelitian, tetapi sejauh mana data mampu menggambarkan fenomena secara lengkap. Dengan demikian, saturasi data lebih menekankan pada kualitas informasi dibandingkan kuantitas.

Dalam literatur metodologi penelitian, saturasi data tidak hanya dipahami sebagai satu konsep tunggal, melainkan memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis saturasi ini membantu peneliti untuk menentukan sejauh mana data yang diperoleh memenuhi

kebutuhan penelitian. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda, bergantung pada fokus dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data atau narasumber dalam suatu penelitian. Mereka memberikan informasi, keterangan, atau data yang dibutuhkan peneliti untuk memahami situasi, kondisi, atau fenomena yang diteliti. Informan juga dianggap sebagai orang penting karena mengetahui baik permasalahan yang akan diteliti. Informan yang peneliti ambil pada penelitian ini adalah Mahasiswa FISIP prodi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Informan penelitian ini di pilih antar leting di karenakan Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda secara alami akan memiliki persepsi yang berbeda, begitu pula mahasiswa senior dan junior. Biasanya, mahasiswa senior sudah memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman daripada mahasiswa junior. Hal yang sama berlaku untuk korupsi. Persepsi mahasiswa akuntansi di setiap angkatan secara alami akan berbeda.

### 3.6 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber aslinta oleh peneliti tanpa perantara. Data ini merupakan data pertama yang diperoleh, dalam pelaksanaan tehnik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung

dnegan informan, dengan menggunakan alat untuk membantu yaitu alat tulis, perekam suara, dan dokumentasi seperti kamera.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, lalu digunakan kembali oleh peneliti. Data ini berbeda dengan data primer, pada data skunder bisa merujuk pada artikel, jurnal, buku, karya ilmiah, atau dari data yang telah di dokumentasi atau di publish.

### 3.7 Teknik Analisis Tematik

Analisis data adalah suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan di tafsirkan, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yakni metode kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikutip oleh Salim yang menyebutkan ada beberapa langkah pengolahan data kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh peneliti dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak. Peneliti mencatat secara rinci yang kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian data (data display)

Setelah di reduksi, langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Menarik Kesimpulan (verification)

Membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga setelah di teliti akan menjadi jelas.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Salim, A, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

UIN Ar-Raniry dulu di kenal sebagai IAIN, IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada IAIN Banda Aceh adalah nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani ( memerintah tahun 1637–1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Dia telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Dalam historitasnya sejak berdiri, IAIN Ar-raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi, telah menunjukkan peran yang signifikans dan strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Alumninya yang sudah merata ditemukan pada hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta (termasuk di luar Aceh). Karena, tidaklah berlebihan untuk disebutkan kalau lembaga ini telah berada dan menjadi "*jantong hate masyarakat Aceh*". Dahulu di UIN Ar-Raniry terdapat 5 fakultas aktif yaitu, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah,

dan Fakultas Adab. Seiring berjalannya waktu kini UIN Ar-Raniry memiliki 9 fakultas aktif di antaranya terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.<sup>57</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan atau lebih dikenal dengan singkatannya yaitu FISIP, sudah ada sejak tahun 2014. Fakultas ini memiliki 2 jurusan pertama Ilmu Politik kedua Ilmu Administrasi Negara. Pada jurusan Ilmu Politik terdapat 61 mata kuliah yang harus diambil diantaranya 60 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah pilihan, dari semua mata kuliah tersebut salah satunya ada mata kuliah Politik Keuangan & Korupsi dan Politik, yang mana mata kuliah ini akan sedikit berkesinambungan dengan apa yang akan diteliti yaitu tentang korupsi.<sup>58</sup>

Pemilihan lokasi ini dilakukan di kampus peneliti sendiri karena lokasi tersebut sesuai dengan fokus penelitian dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Selain itu peneliti telah memahami karakteristik lingkungan kampus dan mahasiswa, hingga proses pengumpulan data dapat dilakukan lebih efektif. Peneliti memilih kampus karena memiliki mahasiswa yang relevan dengan objek penelitian, khususnya banyak mahasiswa yang termasuk golongan generasi Z.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yang dipilih berdasarkan kriteria angkatan dan mahasiswa yang berpengaruh, mulai dari angkatan tua hingga muda serta mahasiswa yang aktif ikut berorganisasi dan tidak aktif dalam organisasi kampus atau di luar kampus. Komposisi ini mencerminkan keberagaman pemikiran dari mahasiswa yang relevan untuk mengkaji persepsi generasi Z secara

---

<sup>57</sup> <https://ar-raniry.ac.id/fakultas/FISIP> di akses pada tanggal 19 Desember 2025.

<sup>58</sup> Ibid.

komprehensif, mayoritas informan merupakan mahasiswa yang lumayan aktif mengikuti kegiatan di dalam maupun luar kampus, sehingga memudahkan peneliti untuk penelitian karena memiliki wawasan yang luas.

#### 4.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan, sesuai dengan visi besar UIN Ar-Raniry yang berfokus pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, maka dari itu visi FISIP UIN Ar-Raniry adalah *“Menjadi fakultas terdepan dalam ilmu sosial dan pemerintahan yang berlandaskan Islam (moderasi beragama), sementara misinya meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang modern, profesional, integratif dengan nilai-nilai keislaman, serta menerapkan teknologi dan tata kelola yang baik untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat lokal hingga global, berfokus pada pengembangan keilmuan sosial dan pemerintahan dengan kearifan lokal dan syariat Islam.”*

Misi yang ada pada FISIP UIN Ar-Raniry ialah

- a. Pendidikan: Melaksanakan pendidikan sosial dan pemerintahan yang integratif antara ilmu umum dan Islam (Dinul Islam) untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan mahasiswa.

- b. Penelitian: Mengembangkan penelitian ilmiah di bidang sosial dan pemerintahan yang inovatif, berorientasi pada penyelesaian masalah, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.
- c. Pengabdian Masyarakat: Melaksanakan pengabdian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.
- d. Penguatan Moderasi Beragama: Memperkuat pendidikan dan penelitian berbasis moderasi beragama serta kerukunan umat beragama dalam menjawab tantangan kontemporer.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.
- f. Tata Kelola: Menerapkan tata kelola akademik (Good University Governance) yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Intinya, FISIP UIN Ar-Raniry menggabungkan keahlian ilmu sosial dan pemerintahan dengan nilai-nilai keislaman untuk melahirkan praktisi yang kompeten, beretika, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid.

## 4.2 Proses Pembentukan Persepsi Mahasiswa FISIP Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia

Setiap individu dalam mempersepsikan sesuatu akan berbeda-beda. persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut yang mempengaruhi kita.<sup>60</sup> Persepsi dapat dipahami sebagai pengalaman seseorang terhadap objek, peristiwa, atau hubungan tertentu yang terbentuk melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang diterima. Melalui persepsi, rangsangan yang ditangkap oleh indera diberi makna. Persepsi juga merupakan proses ketika individu mengorganisasi serta menafsirkan kesan-kesan yang tersimpan dalam ingatan untuk memahami lingkungan sekitarnya. Persepsi seseorang terbentuk dari interaksi dengan orang lain, sehingga menghasilkan pandangan yang khas tentang dunia, yang tidak selalu sepenuhnya sama dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>61</sup> Persepsi mahasiswa terhadap korupsi dan transparansi sangat penting karena membentuk generasi pemimpin masa depan yang sadar pemikirannya dan mendorong pengawasan publik.

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa yang menganggap korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara dan masyarakat sangat dibutuhkan. Persepsi yang

<sup>60</sup> Demmy Deriyanto and others, 'Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok', 7.2 (2018), 77–83.

<sup>61</sup> Azalia Zahra Hazairin, Nindy Shabina Kandi, and Mohamad Alvin Lukman Hadi, 'Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Kesetaraan Gender', 2023, 1194–1204.

baik dapat mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis serta menolak segala bentuk praktik korupsi, baik dalam lingkungan akademik maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila praktik korupsi telah meluas dalam suatu masyarakat dan dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya adalah rusaknya tatanan sosial. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada sistem sosial yang dapat berjalan secara efektif. Setiap individu cenderung bertindak demi kepentingan pribadi semata, bahkan bersikap egois. Akibatnya, nilai kerja sama dan rasa persaudaraan yang tulus di antara anggota masyarakat semakin memudar.<sup>62</sup>

Berbagai temuan dari penelitian di sejumlah negara, yang diperkuat oleh kajian teori para ilmuwan sosial, menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak buruk terhadap keadilan dan kesetaraan sosial. Praktik ini memicu kesenjangan yang semakin lebar antarindividu maupun kelompok sosial, baik dari segi pendapatan, kedudukan, kekuasaan, maupun aspek-aspek lainnya. Korupsi juga memberikan ancaman serius terhadap kualitas moral dan intelektual masyarakat. Ketika praktik ini semakin meluas, nilai-nilai luhur dan keutamaan dalam kehidupan sosial perlahan menghilang. Theobald mengemukakan bahwa korupsi menciptakan suasana yang dipenuhi oleh keserakahan, sikap mementingkan diri sendiri, serta pandangan sinis. Chandra Muzaffar menegaskan bahwa korupsi mendorong individu untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas segala hal, sehingga perhatian hanya tertuju pada dirinya sendiri. Dalam kondisi sosial yang seperti ini, kesediaan masyarakat

---

<sup>62</sup> Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.

untuk berkorban demi kepentingan bersama dan kemajuan sosial akan terus melemah, bahkan berpotensi lenyap sama sekali.<sup>63</sup>

Pandangan negatif mereka terhadap korupsi memperkuat gerakan anti korupsi melalui edukasi dan aksi sosial. Transparansi menjadi kunci utama dalam pencegahan korupsi, dimana persepsi mahasiswa memengaruhi tuntutan kewajiban pemerintah. Cara mahasiswa memandang isu korupsi akan memengaruhi sikap dan kesadaran mereka terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Jika mahasiswa memiliki persepsi yang keliru atau cenderung apatis terhadap korupsi, maka hal tersebut dapat melemahkan nilai kejujuran dan kepedulian sosial. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa FISIP terhadap korupsi dan transparansi di Indonesia, penelitian ini menggunakan indikator dari teori Bimo Walgito. Ada 3 indikator yang digunakan yaitu : 1). Penyerapan ( penerimaan) tahap awal individu menerima informasi, 2). Pemahaman, merupakan proses ketika individu mulai mengerti makna dari informasi yang diterima, 3). Evaluasi (penilaian), tahap ini ketika individu memberikan penilaian terhadap informasi yang diterima.

#### **4.3.1 Penyerapan (penerimaan)**

Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa FISIP menerima informasi mengenai korupsi dan transparansi di Indonesia melalui berbagai sumber, seperti perkuliahan, media massa, media sosial, dan diskusi akademik. Informasi yang diterima umumnya

---

<sup>63</sup> Ibid Hal. 251

dinilai cukup jelas dan mudah diakses, meskipun terdapat perbedaan intensitas penerimaan antar mahasiswa.

Temuan ini sejalan dengan teori persepsi Bimo Walgito yang menyatakan bahwa persepsi diawali dari proses penyerapan, yaitu diterimanya rangsang atau stimulus dari luar individu melalui alat indera. Pada tahap ini, kejelasan stimulus dan perhatian individu sangat memengaruhi terbentuknya kesan awal terhadap objek. Mahasiswa yang lebih sering terpapar informasi dan memiliki perhatian lebih besar menunjukkan tingkat penyerapan yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang jarang mengakses informasi.

Stephen P. Robbins menegaskan bahwa penerimaan informasi merupakan tahap awal dalam proses persepsi sebelum individu mengorganisasi dan menafsirkan makna dari informasi tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa akses dan intensitas informasi menjadi faktor penting dalam pembentukan persepsi mahasiswa terhadap isu korupsi dan transparansi.

Seperti hasil wawancara dengan responden 1 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP, ia menyampaikan bahwasanya sering mendapat informasi tentang korupsi melalui perkuliahan, tetapi di tambah dengan sering nya melihat media sosial, dan itu di instagram karena menurutnya lebih jelas dan akurat, ia mengatakan :

“ saya tidak terlalu fokus mengikuti isu korupsi ini, tetapi ketika saya membuka sosial media dan muncul informasi tentang korupsi saya akan mencari tahu lagi apa kasus tersebut benar dan sedang di usut atau tidak,

dan biasanya saya sering melihat informasi korupsi ini melalui instagram, melalui feed atau reels.”<sup>64</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh responden 2 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP, ia mengatakan biasanya ia melihat atau mencari informasi tambahan tentang isu korupsi selain dari perkuliahan juga mencari informasi itu dari sosial media, jarang melalui media cetak atau televisi, dikarenakan sekarang generasi kami seringkali melihat informasi melalui handphone. Ia mengatakan :

“Biasanya saya mendapatkan informasi mengenai isu korupsi di Indonesia melalui media sosial yang diakses menggunakan handphone. Media sosial menjadi sumber utama karena mudah dijangkau dan informasi terkait kasus korupsi sering muncul dalam bentuk berita, unggahan, maupun diskusi publik. Generasi sekarang ini cenderung lebih sering memperoleh informasi melalui handphone dibandingkan media konvensional, sehingga isu korupsi lebih cepat diketahui dan dibahas di kalangan anak muda.”<sup>65</sup>

Tak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh responden 3 Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP, ia mengatakan sering melihat isu korupsi melalui handphone (HP), karena HP merupakan media yang paling sering ia gunakan dalam aktivitas sehari-hari, menurutnya melalui HP sangat mudah mengakses sosial media dan portal online lainnya. Dan menurutnya informasi isu korupsi biasanya muncul secara realtime di HP, sehingga baginya lebih mudah dan sering menggunakan media sosial saat mencari atau ingin mengetahui isu tersebut. dalam wawancara ia menuturkan :

“Biasanya saya mengetahui dan melihat informasi atau isu tentang korupsi melalui media sosial dan berita online. Media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok. Menurut saya media sering menampilkan berbagai

<sup>64</sup> Wawancara dengan responden 1 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021, 25 Desember 2025.

<sup>65</sup> Wawancara dengan responden 2 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022, 22 Desember 2025.

informasi terkait kasus korupsi, baik dalam bentuk berita singkat maupun konten edukatif. Selain itu, saya juga memperoleh informasi dari portal berita daring sehingga handphone menjadi sarana utama bagi saya sebagai mahasiswa dalam mengakses isu-isu korupsi”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mahasiswa telah menunjukkan indikator penyerapan (penerimaan) terhadap isu korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam menerima dan mengenali informasi terkait korupsi yang diperoleh melalui perkuliahan tetapi media sosial menjadi media tambahan mahasiswa mencari atau menggali isu korupsi. Intensitas tersajinya informasi melalui media digital menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya melihat, tetapi juga menerima isu korupsi sebagai bagian dari realitas sosial yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.3.2 Pemahaman**

Pemahaman merupakan tahap lanjutan setelah penyerapan informasi, dimana individu tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai mengolah dan menafsirkannya. Pada tahap ini, seseorang mampu mengenali makna, konsep, serta hubungan antar informasi yang diterima. Pemahaman ditandai dengan kemampuan individu untuk menjelaskan kembali suatu informasi dengan bahasanya sendiri, mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, serta membedakan antara konsep dan lainnya.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan responden 3 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, 22 Desember 2025

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan transparansi menunjukkan sejauh mana mahasiswa mengetahui pengertian, bentuk, penyebab, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemahaman yang baik tercermin dari kemampuan mahasiswa menginterpretasikan isu korupsi dan transparansi secara logis dan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari, baik melalui perkuliahan, media, maupun pengalaman sosial yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa FISIP telah memahami pengertian korupsi serta pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan negara. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat, meskipun tingkat kedalaman pemahaman masih bervariasi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dapat diketahui bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik mengenai korupsi dan transparansi di Indonesia. Mahasiswa tidak hanya mampu menjelaskan pengertian korupsi dan transparansi secara umum, tetapi juga memahami bentuk bentuk korupsi, dampak yang ditimbulkan, serta pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar menerima informasi tersebut secara kritis sesuai dengan konteks yang terjadi di Indonesia.

Seperti wawancara dengan responden 1 selaku mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021 di FISIP, ia mengatakan korupsi merupakan suatu tindakan yang

sangat merugikan negara. Seharusnya uang tersebut dapat dialokasikan kedalam pembangunan atau kegiatan yang menguntungkan rakyat. Ia mengatakan :

“ Korupsi merupakan tindakan penyelewengan keuangan negara, yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang sangat merugikan negara dan biasanya dilakukan oleh pejabat publik. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap dan penyalahgunaan anggaran. Dampaknya sangat merugikan masyarakat karena menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sedangkan transparansi adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat oleh pejabat publik atau seorang yang menduduki jabatan di pemerintahan”<sup>67</sup>

Korupsi memang sangat merugikan negara, dan tak lain yang merasakan dampak korupsi ini ialah masyarakat Indonesia sendiri. Sama halnya wawancara dengan responden 3 selaku mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP, ia mengatakan :

“Menurut saya, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terutama yang berkaitan dengan pengambilan atau pengelolaan uang negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Dampak dari korupsi sangat merugikan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial, sedangkan transparansi adalah prinsip keterbukaan pemerintah negara dalam memberikan informasi pengelolaan kebijakan publik secara jujur serta informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga publik bisa mengawasi jalannya pemerintah.”<sup>68</sup>

Mahasiswa memahami bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat, sementara transparansi dipandang sebagai prinsip penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Begitu juga

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan responden 1 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021, 25 Desember 2025

<sup>68</sup> Wawancara dengan responden 3 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, 22 Desember 2025

yang disampaikan oleh dengan Responden 2 selaku mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021 di FISIP, ia mengatakan :

“Bagi saya, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menerima suap atau menyalahgunakan anggaran. Akibatnya, korupsi menyebabkan kerugian negara dan menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat, sedangkan transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan negara sehingga masyarakat dapat mengetahui atau mengawasi setiap kebijakan yang telah pemerintah kerjakan.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa terlihat adanya kesamaan pandangan mengenai korupsi dan transparansi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FISIP pada umumnya telah memiliki pemahaman dasar mengenai isu korupsi dan transparansi. Jawaban informan menunjukkan bahwa korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara, sedangkan transparansi dipahami sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Juga dapat diketahui bahwa pemahaman mereka terhadap korupsi dan transparansi tergolong baik. Mahasiswa memahami bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat, sementara transparansi dipandang sebagai prinsip penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan responden 2 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021, 19 Desember 2025

### 4.3.3 Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, dapat diketahui bahwa mahasiswa tidak hanya memahami korupsi dan transparansi, tetapi juga telah mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa menilai bahwa praktik korupsi masih menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada tahap ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP secara umum memberikan penilaian negatif terhadap praktik korupsi dan menilai transparansi sebagai hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa menilai korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, serta menghambat pembangunan dan keadilan sosial. Mahasiswa berpendapat bahwa transparansi merupakan aspek penting yang belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa menilai bahwa keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pengambilan kebijakan, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung bersikap kritis terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Mahasiswa menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan korupsi dalam bentuk apa

pun serta menekankan pentingnya peran pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Pada indikator evaluasi dapat disimpulkan mahasiswa telah mampu menilai, mengkritisi, dan membentuk sikap terhadap isu korupsi dan transparansi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berhenti pada tahap pemahaman, tetapi telah sampai pada tahap evaluatif dalam memaknai isu-isu tersebut.

Pandangan mahasiswa terhadap praktik transparansi pemerintah umumnya terbentuk dari pengalaman sehari-hari mereka dalam mengakses informasi publik, seperti kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta kinerja pejabat negara. Mahasiswa cenderung menilai bahwa transparansi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan pencegahan praktik korupsi. Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami, mahasiswa merasa pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa praktik transparansi pemerintah di Indonesia masih bersifat formalitas.

Informasi memang tersedia melalui situs resmi atau media sosial pemerintah, tetapi sering kali sulit diakses, kurang lengkap, atau menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa transparansi belum sepenuhnya dijalankan secara substansial, melainkan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi. Seperti yang disampaikan mahasiswa saat peneliti melakukan wawancara, pandangan mahasiswa terhadap sistem transparansi

pemerintah sedikit kecewa dan perlu di tingkatkan, hal itu disebabkan karena pemerintah sendiri belum terbuka akan Informasi terkait pengeluaran maupun pemasukkan uang dan informasi lainnya. Adapun wawancara dengan responden 5 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP, ia mengatakan :

“ Transparansi yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sepertinya masih belum terlalu baik, hal itu di sebabkan karena tidak adanya informasi rinci yang di paparkan pemerintah terkait anggaran suatu proyek yang dikerjakan, contoh kasus ada di Aceh sendiri yaitu pengerjaan proyek simbolis suatu daerah, pada awal pengerjaan tidak ada di informasikan kemana saja uang tersebut digunakan yang mana uang tersebut tidaklah sedikit. Nah pemerintah setempat tidak memaparkan rincian dana pengeluaran terhadap proyek tersebut sehingga membuat masyarakat bertanya tanya akan hal itu.”<sup>70</sup>

Mahasiswa juga menyoroti kurangnya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, masukan, dan pengawasan dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Ketika aspirasi publik tidak ditindaklanjuti secara nyata, kepercayaan terhadap praktik transparansi pemerintah cenderung menurun. Secara keseluruhan, mahasiswa memandang transparansi pemerintah sebagai prinsip yang sangat penting, namun pelaksanaannya masih perlu di tingkatkan. Di perlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk menyajikan informasi yang jujur, mudah diakses, dan relevan, serta membuka ruang di alog yang lebih luas dengan masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan responden 5 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021, 22 Desember 2025

hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Seperti yang di sampaikan oleh responden 6 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP :

“Transparansi pemerintah dalam memberikan informasi masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Memang saat ini pemerintah sudah menyediakan berbagai kanal informasi, seperti website resmi dan media sosial, namun informasi yang disampaikan sering kali tidak lengkap dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, khususnya generasi muda. Keterbukaan informasi masih cenderung bersifat satu arah. Pemerintah menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tetapi kurang memberi ruang bagi masyarakat untuk bertanya atau mengkritisi secara langsung. Akibatnya, informasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan publik.”<sup>71</sup>

Dapat diketahui bahwa mahasiswa menilai transparansi pemerintah dalam penyampaian informasi publik masih belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kanal informasi, seperti website resmi dan media sosial, mahasiswa menilai bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, mahasiswa memandang bahwa keterbukaan informasi yang ada masih bersifat satu arah, di mana pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi tanpa memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, seperti bertanya, memberikan masukan, atau melakukan kritik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang di terapkan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan informasi publik dan masih memerlukan peningkatan, baik dari segi kualitas informasi maupun pola komunikasi yang lebih partisipatif. Tidak jauh berbeda wawancara dengan responden 7 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP, ia mengatakan :

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan responden 6 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021, 22 Desember 2025

“ Transparansi pemerintah masih belum maksimal, ada informasi yang di umumkan tetapi sering kali sulit di akses oleh masyarakat sendiri, padahal keterbukaan informasi kepada masyarakat itu sangat penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bagaimana sistem transparansi yang pemerintah lakukan masih terpantau belum memuaskan masyarakat, transparansi informasi menjadi pokok penting agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama informasi mengenai keuangan dan fiskal yang dilakukan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, transparansi dapat dilaksanakan jika tugas dan kewenangan jelas, keterbukaan proses penganggaran, adanya jaminan interitas dari pihak independen tentang pemikiran informasi, fiskal serta penjabarannya, dan ada ketersediaan informasi kepada publik.<sup>73</sup>

Pada tahap evaluasi ini dan berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan juga bahwa Generasi Z tidak dapat dilepaskan dari potensi melakukan tindak korupsi, meskipun secara umum mereka memiliki pengetahuan dan sikap kritis terhadap isu korupsi. Responden menilai bahwa faktor utama yang berpotensi mendorong terjadinya korupsi pada Generasi Z bukan terletak pada ketidaktahuan, melainkan pada inkonsistensi antara pemahaman nilai dan praktik perilaku, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang memberikan keuntungan pribadi.

Informan secara tegas menyampaikan bahwa korupsi tidak selalu bermula dari niat besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah dan tidak

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Responden 7 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022, 22 Desember 2025

<sup>73</sup> Veti Kartika Sari, ‘TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA’.

berdampak serius. Praktik seperti manipulasi data, titip absen, memanfaatkan relasi untuk kepentingan pribadi, serta mencari jalan pintas dinilai sebagai bentuk awal degradasi integritas. Ketika perilaku tersebut menjadi kebiasaan, maka akan membentuk pola pikir permisif terhadap tindakan tidak jujur yang berpotensi berkembang menjadi korupsi struktural di masa depan. Hasil wawancara dengan responden 3 mengatakan :

“Generasi Z itu sebenarnya paham betul apa itu korupsi dan dampaknya. Tapi masalahnya, banyak yang masih menormalisasi kecurangan kecil. Kalau hal-hal kecil saja sudah dibenarkan, ketika nanti mereka punya wewenang dan akses, korupsi itu sangat mungkin terjadi, bukan soal generasinya, tapi soal sistemnya. Kalau Generasi Z masuk ke lingkungan kerja yang tidak transparan dan pengawasannya longgar, mereka juga bisa terjebak. Apalagi kalau tekanan ekonomi dan gaya hidup ikut bermain.”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi, Generasi Z telah mampu memberikan penilaian kritis terhadap fenomena korupsi, termasuk merefleksikan kemungkinan keterlibatan generasi mereka sendiri. Namun, kesadaran tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjamin terbentuknya sikap antikorupsi yang kuat, sehingga diperlukan penguatan nilai integritas dan transparansi secara berkelanjutan.

Generasi Z telah mampu melakukan penilaian kritis terhadap fenomena korupsi, termasuk mengakui kemungkinan keterlibatan generasi mereka sendiri. Namun, kemampuan evaluatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan komitmen perilaku yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai integritas,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan responden 3 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, 22 Desember 2025

transparansi sistem, serta keteladanan dalam lingkungan sosial agar potensi korupsi di kalangan Generasi Z dapat diminimalisir.

#### **4.3 Pemahaman Mahasiswa FISIP Tentang Korupsi dan Transparansi di Indonesia**

Pemahaman mahasiswa FISIP terhadap isu korupsi dan transparansi tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan yang mereka terima selama perkuliahan. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan dipahami bukan sekadar sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses kognitif yang membentuk cara mahasiswa menerima, mengolah, dan menilai informasi mengenai korupsi dan transparansi. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa dianalisis berdasarkan kemampuan kognitif yang tercermin dalam penguasaan konsep, penalaran kritis, serta kemampuan mengaitkan teori dengan realitas empiris.<sup>75</sup>

Pemahaman tersebut tidak muncul secara seragam pada setiap mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang mereka peroleh, baik melalui mata kuliah, metode pengajaran dosen, maupun aktivitas akademik pendukung di luar kelas. Mahasiswa yang lebih banyak terpapar pada pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, dan pengalaman lapangan cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan mahasiswa yang hanya menerima pembelajaran secara teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa variasi metode pembelajaran berpengaruh

---

<sup>75</sup> Yusrianto Kadir, 'Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi', 2008, 25–38.

terhadap capaian kognitif mahasiswa dalam memahami isu korupsi dan transparansi.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, pemahaman mahasiswa tentang isu korupsi dan transparansi tidak hanya dinilai berdasarkan pengetahuan mereka melalui mata kuliah atau pendidikan semata, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka untuk menerima, memproses, dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Pemahaman ini merupakan bagian dari proses kognitif yang melibatkan aktivitas berpikir bertahap, mulai dari mengenali informasi hingga memberikan penilaian kritis terhadap suatu fenomena. Maka dari itu, untuk menganalisis tingkat pemahaman siswa secara sistematis dan terukur, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menekankan aspek kognitif sebagai dasar untuk meneliti proses berpikir dan interpretasi siswa tentang korupsi dan transparansi di Indonesia.

#### **4.3.1 Konsep Taksonomi Bloom (ranah kognitif)**

Taksonomi Bloom pada ranah kognitif digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep korupsi dan transparansi. Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengolah dan menilai isu korupsi dan transparansi secara kritis.

---

<sup>76</sup> Ibid Hal. 26

Berdasarkan hasil penelitian, pada tingkat mengingat (*remember*) dan memahami (*understand*), sebagian besar mahasiswa telah mampu menyebutkan definisi korupsi, bentuk-bentuknya, serta makna transparansi dalam pemerintahan. Mahasiswa juga menunjukkan pemahaman awal mengenai dampak negatif korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diperoleh melalui mata kuliah yang relevan, diskusi di kelas, serta paparan informasi dari media. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dasar mahasiswa berada pada kategori cukup baik, terutama dalam hal penguasaan konsep dan istilah yang berkaitan dengan korupsi dan transparansi.

Ranah kognitif dalam pendidikan merujuk pada kemampuan berpikir individu dalam memproses pengetahuan, mulai dari mengingat dan memahami hingga menganalisis dan mengevaluasi informasi. Ranah ini menjadi dasar penting dalam pencapaian tujuan pendidikan karena mencerminkan tingkat penguasaan konsep dan kualitas pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, ranah kognitif berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menilai keberhasilan proses pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa.

Pemberian materi kepada mahasiswa bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai korupsi beserta strategi penanggulangannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini agar terbentuk integritas pribadi maupun kelembagaan. Dengan begitu, diharapkan dapat tumbuh budaya antikorupsi di lingkungan mahasiswa dan perguruan tinggi, sehingga seluruh unsur

kampus terdorong untuk berperan aktif dalam gerakan antikorupsi. Dalam jangka panjang, pendidikan ini diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang profesional, berintegritas, tidak hanya mengejar prestasi akademik semata, serta memiliki komitmen kuat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan adanya variasi persepsi terhadap efektivitas pembelajaran antikorupsi di FISIP. Sebagian mahasiswa menilai bahwa materi perkuliahan telah memberikan pemahaman konseptual yang memadai, sementara sebagian lainnya menganggap metode pembelajaran yang bersifat monoton, seperti penugasan makalah dan presentasi kelompok, kurang efektif dalam mengasah kemampuan analitis dan evaluatif. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh level ranah kognitif sebagaimana yang diharapkan dalam Taksonomi Bloom.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan responden 2 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022 di FISIP, ia mengatakan bahwa mata kuliah korupsi yang ia jalani selama duduk di bangku kuliah sudah sangat memuaskan dan sangat mudah dipahami baik secara konsep maupun teori, dalam wawancara tersebut ia menuturkan:

“ Berdasarkan mata kuliah yang telah saya pelajari di FISIP, pemahaman saya mengenai korupsi dan transparansi tergolong cukup baik, terutama dari sisi konsep dan teori. Dalam perkuliahan, saya memahami pengertian korupsi, berbagai bentuk korupsi yang sering terjadi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, saya juga memahami bahwa transparansi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>77</sup> Ibid hlm. 30

kekuasaan. Tetapi pemahaman yang saya peroleh masih lebih banyak bersifat teoritis. Pembahasan mengenai kasus-kasus korupsi nyata dan praktik transparansi di lapangan masih relatif terbatas. Saya merasa pembelajaran akan lebih efektif apabila disertai dengan studi kasus, diskusi mendalam, atau kegiatan pendukung seperti seminar dan kuliah tamu, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan konsep korupsi dan transparansi secara lebih konkret atau benar benar ada.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan responden 2 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022 menunjukkan bahwa pemahaman terhadap korupsi dan transparansi berada pada level kognitif mengingat (*remember*) dan memahami (*understand*). Responden mampu menjelaskan pengertian korupsi, bentuk-bentuknya, serta dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, responden juga memahami transparansi sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi, responden menegaskan bahwa pemahaman yang diperoleh masih dominan bersifat teoritis dan belum didukung oleh pembahasan kasus nyata maupun praktik transparansi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan kognitif mahasiswa belum berkembang secara optimal pada level menerapkan (*apply*) dan menganalisis (*analyze*), yang menuntut kemampuan mengaitkan konsep dengan realitas empiris.

Sementara itu, wawancara dengan responden 8 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP menunjukkan tingkat pemahaman yang relatif lebih rendah terhadap isu antikorupsi. Responden menilai bahwa metode pembelajaran yang diterapkan, khususnya penugasan makalah dan presentasi kelompok, belum efektif dalam

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Responden 2 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022, 22 Desember 2025.

meningkatkan pemahaman mahasiswa secara mendalam. Dalam wawancara responden 8 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP menyatakan

“ Pendapat pribadi saya, sejujurnya masih kurang. Karena ketika pembelajaran korupsi ini berlangsung dosen hanya menyuruh kami mahasiswa mengerjakan makalah secara kelompok lalu di presentasikan. Menurut saya Karena ini membahas isu korupsi lebih baik jika dosen menyuruh kami untuk berdiskusi secara langsung dan terbuka, hal itu akan mengasah wawasan kami terkait mata kuliah korupsi ini. Dan hal ini saya rasa sangat baik karena ketika berdiskusi secara terbuka di kelas, mahasiswa bisa dengan leluasa menunjukkan argumen mereka masing masing tentang isu ini. saya rasa lebih dilakukan seperti ini dari pada pembuatan makalah Karena monoton dan teman teman di kelas bertanya hanya sebagai syarat agar mendapat nilai saja”<sup>79</sup>

Berbeda dengan responden sebelumnya, wawancara dengan responden 9 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP menunjukkan bahwa pembelajaran korupsi dan transparansi di FISIP dinilai telah berjalan dengan baik dan memuaskan. Responden menyatakan bahwa selain memperoleh pemahaman konseptual mengenai korupsi dan transparansi, mahasiswa juga diajak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran berbasis pengalaman, seperti kegiatan lapangan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus korupsi, dalam wawancara ia mengatakan :

“ Menurut saya pembelajaran atau pendidikan korupsi dan transparansi di FISIP sudah membantu saya memahami dengan betul apa itu korupsi, bagaimana dampak negatif dari korupsi itu sendiri dan bagaimana di eksekusinya pelaku korupsi. Sama juga dengan transparansi, saya rasa FISIP sudah semaksimal mungkin mengajarkannya kepada mahasiswa. selama pembelajaran saya merasa cukup puas karena saat itu dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut sudah ahli dibidangnya, saya dan teman teman tidak saja mendapat materi dikelas tetapi kami juga di ajak turun ke

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan responden 8 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2023, 23 Desember 2025.

lapangan untuk mempelajari bagaimana kasus atau isu korupsi itu di usut tuntas.”<sup>80</sup>

Perbedaan persepsi antarresponden tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isu korupsi dan transparansi tidak bersifat homogen. Dengan menggunakan kerangka Taksonomi Bloom, variasi jawaban responden dapat dipahami sebagai perbedaan capaian ranah kognitif, mulai dari penguasaan konsep dasar hingga kemampuan analisis terhadap praktik korupsi dan transparansi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kualitas interaksi dosen dan mahasiswa, serta adanya atau tidaknya pembelajaran berbasis pengalaman.

Tantangan utama yang dihadapi perguruan tinggi saat ini adalah mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan integritas bangsa. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran, sikap kritis, dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari praktik korupsi.

Dalam konteks pendidikan transparansi, pemahaman mahasiswa menjadi sangat penting mengingat lulusan FISIP pada umumnya akan terlibat langsung dalam dunia kerja yang berkaitan dengan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pentingnya transparansi keuangan, baik di kalangan mahasiswa maupun pengelola perguruan tinggi. Transparansi sering kali dipahami sebatas pemenuhan regulasi, tanpa disertai kesadaran akan perannya

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan responden 9 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, 22 Desember 2025.

dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan sistem informasi yang memadai agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara optimal di lingkungan perguruan tinggi.<sup>81</sup>

Berdasarkan analisis pemahaman mahasiswa menggunakan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif, diketahui bahwa pemahaman mahasiswa FISIP terhadap isu korupsi dan transparansi masih didominasi oleh kemampuan kognitif tingkat dasar, yaitu mengingat (*remember*) dan memahami (*understand*). Sementara itu, kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti menerapkan (*apply*), menganalisis (*analyze*), dan mengevaluasi (*evaluate*) belum berkembang secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas yang bersifat teoritis belum sepenuhnya mampu mendorong mahasiswa untuk mengaitkan konsep dengan realitas empiris. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pembelajaran pendukung yang bersifat kontekstual dan reflektif, salah satunya melalui partisipasi kampus dalam penyelenggaraan seminar antikorupsi.

#### 4.3.2 Partisipasi Kampus Dalam Penyelenggaraan Seminar Antikorupsi

Partisipasi kampus dalam penyelenggaraan seminar antikorupsi merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung penguatan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi. Seminar dan kegiatan akademik sejenis berfungsi

---

<sup>81</sup> Yusnar Yusuf Sekedang and Ilham Hidayah Napitupulu, 'Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Implementasi E-Government Di Politeknik Negeri Medan', 2.2 (2025), 39–47.

sebagai sarana pembelajaran nonformal yang dapat melengkapi pembelajaran di kelas, khususnya dalam mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa partisipasi mahasiswa dalam seminar antikorupsi masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya penyelenggaraan kegiatan seminar antikorupsi di lingkungan kampus. Akibatnya, mahasiswa cenderung hanya memperoleh pemahaman antikorupsi secara teoritis melalui mata kuliah, tanpa penguatan melalui forum diskusi yang bersifat aplikatif dan kontekstual.

Kurangnya partisipasi kampus dalam kegiatan seminar antikorupsi juga dapat menghambat terbentuknya budaya akademik yang kritis dan berintegritas. Kampus seharusnya mampu berperan sebagai agen perubahan dengan secara aktif menghadirkan forum-forum edukatif yang relevan dengan persoalan sosial, termasuk korupsi. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari institusi pendidikan tinggi untuk mendorong kegiatan tersebut, upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan menjadi kurang maksimal, dan peran kampus sebagai motor penggerak nilai antikorupsi tidak dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 10 mahasiswa Ilmu Politik di FISIP ia mengatakan :

“ Selama kuliah dan saat ini saya termasuk dalam leting yang lama di kampus, saya jarang mengikuti kegiatan seminar anti korupsi tetapi seminar lainnya lumayan banyak saya ikuti. Saya jarang mendengar diadakannya seminar anti korupsi itu kalau di kampus sendiri, mungkin saran nya itu kepada kampus lebih memperhatikan hal ini dikarenakan isu

korupsi sangat berpengaruh bagi generasi saya dan teman teman lain yang generasi muda ini.”<sup>82</sup>

Kampus memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa, melalui seminar anti korupsi mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teori, tetapi juga di tanam nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial sejak dini. Seperti wawancara dengan responden 11 Mahasiswa Ilmu Politik di FISIP, ia mengatakan :

“ Kalau sekiranya seminar antikorupsi, saya rasa tidak pernah ikut serta, baik kegiatan di kampus atau pun di luar kampus. Mungkin yang pernah saya ikuti hanya kampanye antikorupsi yang di adakan oleh organisasi mahasiswa begitu. Seharusnya ini bisa jadi saran atau masukkan kepada pihak kampus untuk memulai pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa tidak saja di mata kuliah namun perlu dilakukan pelatihan antikorupsi, setidaknya mengadakan seminar antikorupsi. Karena kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter mahasiswa. Mereka tidak hanya mendapat ilmu teori tapi dapat di tanamkan rasa tanggung jawab sejak dini.”<sup>83</sup>

Seminar anti korupsi membantu mahasiswa memahami bentuk –bentuk korupsi serta dampaknya kepada masyarakat. Partisipasi kampus dapat memicu mahasiswa untuk terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi, baik melalui diskusi kritis, kegiatan organisasi, amupun aksi sosial berbasis nilai integritas. Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan responden 12 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP, ia mengatakan :

“ Saya tidak pernah mengikuti kegiatan seminar antikorupsi di kampus, saya rasa kampus juga jarang atau bahkan tidak pernah sepertinya mengadakan seminar antikorupsi di kampus. Sekiranya dengan di adakan seminar antikorupsi ini akan membuat mahasiswa berfikir kritis dan dapat mengadakan kegiatan organisasi. Padahal topik ini sangat penting untuk

<sup>82</sup> Wawancara dengan responden 10 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2020, 22 Desember 2025.

<sup>83</sup> Wawancara dengan responden 11 mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2022, 25 Desember 2025.

disosialisasikan karena akan berpengaruh pada mahasiswa FISIP karena dunia kerja kami yang akan berpartisipasi penuh di dalam pemerintahan.  
»<sup>84</sup>

Perlu diketahui pengadaan seminar di kampus ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa, apalagi dengan isu korupsi yang sangat besar. Peran kampus dalam pengadaan seminar terutama sebagai bagian dari fungsi pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa. Kampus bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembinaan nilai-nilai etika, dan tanggung jawab sosial. Seminar antikorupsi di lingkungan kampus berperan sebagai sarana peningkatan kesadaran kritis mahasiswa. Diskusi yang menghadirkan akademisi, praktisi, maupun lembaga antikorupsi dapat mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara dan kebijakan publik. Hal ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu melihat realitas dan tantangan pemberantasan korupsi.

Partisipasi kampus dalam penyelenggaraan seminar antikorupsi memiliki posisi strategis dalam mendorong pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa pada level yang lebih tinggi. Seminar tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog akademik yang memungkinkan mahasiswa mengaitkan konsep teoritis dengan realitas empiris. Melalui diskusi kasus, pemaparan praktisi, serta interaksi langsung dengan isu aktual, mahasiswa didorong untuk tidak sekadar memahami korupsi secara konseptual, tetapi

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan responden 12 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021, 22 Desember 2025.

juga mampu menerapkan dan menganalisis fenomena korupsi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan analisis melalui persepsi yang ditetapkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa perbedaan persepsi dipengaruhi oleh ketidaksamaan penyerapan atau rangsangan yang di terima, kurangnya pemahaman atau pengertian sehingga menentukan penilaian atau evaluasi. Persepsi terhadap suatu institusi atau lembaga pendidikan bisa dikatakan sangat variatif. Hal ini di karenakan institusi pendidikan sebagai suatu organisasi yang menjual produk berupa jasa bukan berupa barang. Bentuk produk yang berupa jasa ini menjadikan penilaian yang berbeda mengenai ukuran tingkat kepuasan atau kualitas layanan yang di berikan. Dengan kata lain akan sangat sulit untuk menetapkan standar baku kepuasan atau kualitas layanan. Untuk itu suatu institusi yang menjual produk berupa jasa harus selalu melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perguruan Tinggi sebagai salah satu organisasi yang menawarkan jasa di bidang pendidikan, harus membangun persepsi masyarakat bahwa kualitas layanan yang diberikan dan produk yang dihasilkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman mahasiswa FISIP terhadap korupsi dan transparansi umumnya berada pada level kognitif mengingat (remember) dan memahami (understand). Mahasiswa telah mampu menjelaskan pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta konsep transparansi dalam penyelenggaraan

---

<sup>85</sup> Akbar, R. F. (2015). Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).

pemerintahan. Selain itu, mahasiswa juga memahami dampak negatif korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman tersebut diperoleh melalui mata kuliah yang relevan, diskusi di kelas, serta paparan informasi dari media massa dan media digital.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry sebagai bagian dari Generasi Z pada umumnya memiliki persepsi kritis terhadap isu korupsi dan transparansi di Indonesia. Berdasarkan indikator persepsi menurut Bimo Walgito, mahasiswa telah melalui tahapan penyerapan, pemahaman, hingga evaluasi. Pada tahap penyerapan, mahasiswa menerima informasi terkait korupsi dan transparansi dari berbagai sumber, terutama perkuliahan, media sosial, dan diskusi akademik.
2. Pada tahap pemahaman, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP telah memahami konsep dasar korupsi dan transparansi dengan cukup baik. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korupsi, bentuk-bentuknya, serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara. Transparansi dipahami sebagai prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik agar dapat diawasi oleh masyarakat. Tetapi

pemahaman tersebut masih cenderung bersifat konsep dan teori, serta belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang mendalam mengenai praktik nyata pemberantasan korupsi dan penerapan transparansi di lapangan.

3. Analisis menggunakan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa masih didominasi oleh kemampuan kognitif tingkat dasar, yaitu mengingat (remember) dan memahami (understand). Sementara itu, kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti menerapkan (apply), menganalisis (analyze), dan mengevaluasi (evaluate) belum berkembang secara optimal pada seluruh mahasiswa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang bersifat teoritis belum sepenuhnya mampu mendorong mahasiswa untuk mengaitkan konsep korupsi dan transparansi dengan realita dari pengamatan langsung.
4. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi kampus dalam penyelenggaraan seminar antikorupsi masih tergolong rendah. Sebagian besar mahasiswa mengaku jarang atau bahkan belum pernah mengikuti seminar antikorupsi yang diselenggarakan oleh pihak kampus. Kondisi ini menyebabkan proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi belum berjalan secara optimal. Padahal, seminar antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kritis, nilai integritas, serta tanggung jawab sosial mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa FISIP yang nantinya akan terjun ke dunia kerja dan pemerintahan.

## 5.2 Saran

### 1. Saran bagi Perguruan Tinggi (FISIP UIN Ar-Raniry)

Perguruan tinggi, khususnya FISIP UIN Ar-Raniry, diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan transparansi kepada mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pendukung seperti seminar, diskusi publik, kuliah umum, dan pelatihan antikorupsi yang melibatkan akademisi, praktisi, maupun lembaga antikorupsi. Kegiatan tersebut penting untuk melengkapi pembelajaran di kelas agar mahasiswa tidak hanya memahami isu korupsi dan transparansi secara teoritis, tetapi juga secara praktis dan kontekstual. Selain itu, metode pembelajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan korupsi dan transparansi diharapkan dapat dikembangkan secara lebih interaktif, misalnya melalui studi kasus, diskusi terbuka, dan analisis peristiwa aktual. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih kritis dan aktif dalam memahami serta merespons isu korupsi dan transparansi di Indonesia.

### 1. Saran bagi Mahasiswa جامعة الرانيري

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu korupsi dan transparansi, tidak hanya sebatas memahami konsep yang diperoleh dari perkuliahan, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Mahasiswa diharapkan lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima, khususnya dari media sosial, serta mampu memanfaatkan informasi tersebut sebagai sarana pengawasan dan kontrol sosial terhadap praktik

penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa juga diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

## 2. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyampaian informasi publik terkait kebijakan dan penggunaan anggaran. Informasi yang disampaikan sebaiknya bersifat terbuka, rinci, mudah diakses, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat memberikan masukan, kritik, dan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan yang dijalankan.

## 3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu korupsi dan transparansi dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi penelitian, jumlah informan, maupun metode penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi generasi muda terhadap korupsi dan

transparansi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas program pendidikan dan kegiatan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2015). Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1).
- Elvira, Ilma Dwi, Afifuddin Afifuddin, and Langgeng Rachmatullah Putra. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)." *Respon Publik* 19.1, 73-82, 2025.  
<https://ar-raniry.ac.id/fakultas/FISIP> di akses pada tanggal 19 Desember 2025.  
<https://ar-raniry.ac.id/fakultas/FISIP> di akses pada tanggal 25 September 2025.
- Jannah, Salma Miftakhul, and Agus Satmoko Adi. "Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X." *Journal of Civics and Moral Studies*, 8.1 (2023).
- Kawuryan, S. (2012). Upaya meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang melalui penerapan pendekatan matematika realistik peserta didik kelas iv sdn 2 brengkelan purworejo tahun ajaran 2011/2012.
- Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Majid, Jamaluddin. "Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11.2 (2021): 186-205.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.
- Nalil K. Nurzannah, Nurhasanah N. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan", *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2015.

- Nugroho, R., & Yudho, A. "Pengaruh Teknologi Terhadap Kesadaran Anti-Korupsi di Kalangan Mahasiswa Generasi Z." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, (2021).
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4.1 (2022).
- Peters, B. Guy, and Jon Pierre. "Citizens versus the new public manager: The problem of mutual empowerment." *Administration & Society* 32.1, 9-28, 2000.
- Rani, Dewi Lingga, Emrinaldi Nur, and Azwir Nasir. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Riau)." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5.1 (2021).
- Rawanoko, E. S. "Persepsi Mahasiswa terhadap Pendidikan Anti Korupsi melalui Kantin Kejujuran di Universitas Wisnuwardhana Malang". *Likhitaprajna*, 21(2), 131-140 (2019).
- Rusmita, S. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi". *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 4(01) 2015.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47.4 (2017): 459-476.
- Salim, A, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Sari, D. "Generasi Z dan Korupsi: Harapan dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (2022).
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.

- Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi peran, konsistensi peran, dan kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(4), 02-02.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sukiati, "Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi" Surabaya CV. Jakad Media Publishing (2020).
- Sumantri, Ii. "Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5.1 (2023): hal 99
- Tim LP3 UMY, 2004: 212. Pada Wayan Gede Suacana. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi. Akses di [wgsuacana.files.wordpress.com](http://wgsuacana.files.wordpress.com)
- Utari, Retno, Widyaiswara Madya, and K. N. P. K. Pusdiklat. "Taksonomi bloom." *Jurnal: Pusdiklat KNPk* 766.1 (2011): 1-7.
- Wilhelmus, Ola Rongan. "Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17.9 (2017): 26-42.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2903/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 07 Oktober 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :  
 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing I  
 2. Dani Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc. Sebagai pembimbing II  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Shefira Dhiya Salaabla  
 NIM : 210801082  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Judul : Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi Dan Transparansi Di Indonesia (Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-03/Un.08/FISIP.I.05/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210801082

Nama : SHEFIRNA DHIYA SALSABILA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : Jln. Lintang, Takengon Sara Rasa Keramat Mupakat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP KORUPSI DAN TRANSPARANSI DI INDONESIA (STUDI KASUS : MAHASISWA FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 15 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 29 Mei 2026

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

AR - RANIRY



### Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon: 0651-7552921, 7552922; Fax. 0651-7552921  
 Website: [www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id](http://www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

#### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 73/Un.08/FISIP/TL.00/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. MUJI MULIA, M.Ag.  
 NIP : 19740327 199903 1 005  
 Pangkat, Golongan : Guru Besar, IV/b  
 Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

dengan ini memberi izin kepada :

Nama : SHEFIRNA DHIYA SALSABILA  
 NIM : 210801082  
 Podi/ Fakultas : Ilmu Politik / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
 Judul Penelitian : Persepsi Generasi Z Terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia (Studi Kasus : Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

untuk melakukan penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026



## Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara

### Instrumen Wawancara

Nama Responden :

Nim :

Program Studi :

1. Bagaimana Persepsi Mahasiswa FISIP terhadap Korupsi dan Transparansi di Indonesia?

- Apa yang anda ketahui tentang korupsi dan tranparansi?
- Dari mana biasanya anda mendapatkan informasi tentang isu korupsi di indonesia?
- Menurut anda apa dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Aceh sendiri?
- Bagaimana pandangan anda mengenai transparansi pemerintah dalam memberikan informasi?
- Apakah menurut anda mata kuliah di Fisip sudah cukup membahas pemahaman korupsi dan tranparansi pemerintahan?

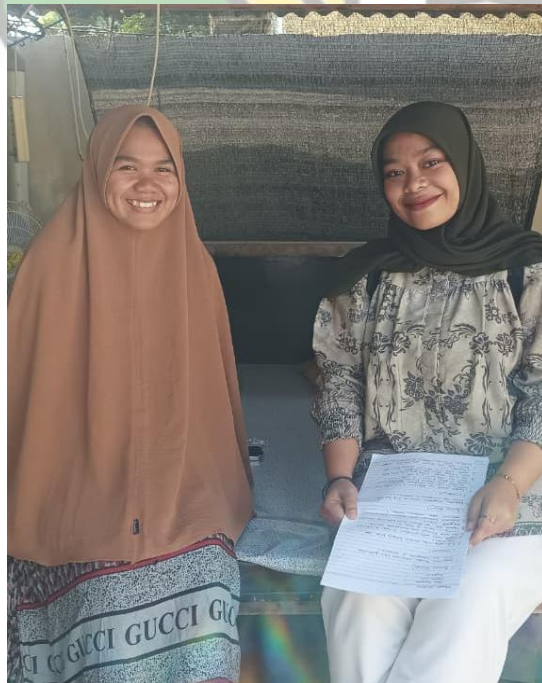
2. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa FISIP tentang Korupsi dan Tranparansi di Indonesia?

- Pernahkah anda mengikuti kegiatan pembelajaran tentang anti korupsi di kampus / di acara seminar? selain dari mata kuliah yang ada.
- Pernahkah anda ikut dalam lembaga / gerakan anti korupsi?
- Kasus korupsi apa yang terakhir kali anda ketahui atau dengar informasinya?

- Bagaimana tingkat pemahaman anda terkait korupsi dan tranparansi di mata kuliah yang sudah anda pelajari?
- Adakah saran atau masukan yang ingin anda sampaikan terkait isu korupsi dan tranparansi di Indonesia? baik di akademik maupun non akademik



### Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian







Wawancara dengan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik.